

**ANALISIS KONTRIBUSI, PERBANDINGAN DARI TAHUN KE TAHUN
SERTA PREDIKSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2005-2009**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh :

Agustinus Wibowo Amituhu

NIM : 062114116

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011**

**ANALISIS KONTRIBUSI, PERBANDINGAN DARI TAHUN KE TAHUN
SERTA PREDIKSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2005-2009

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Agustinus Wibowo Amituhu

NIM : 062114116

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2011

SKRIPSI

**ANALISIS KONTRIBUSI, PERBANDINGAN DARI TAHUN KE TAHUN
SERTA PREDIKSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Klaten

Tahun 2005-2009

Oleh :

Agustinus Wibowo Amituhu

NIM : 062114116



Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Tanggal 3 Maret 2011

Firma Sulistiyowati, SE., M.Si, QIA

SKRIPSI

**ANALISIS KONTRIBUSI, PERBANDINGAN DARI TAHUN KE TAHUN
SERTA PREDIKSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**

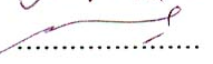
**Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2005-2009**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Agustinus Wibowo Amituhu
062114116

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 24 Maret 2011
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt	
Sekretaris	: Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA	
Anggota	: Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA	
Anggota	: A. Diksa Kuntara, S.E., M.F.A., QIA	
Anggota	: Josephine Wuri, S.E., M.Si.	

Yogyakarta, 31 Maret 2011
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Rahasia kebahagiaan

Bukan terletak pada melakukan apa yang kita sukai

Tetapi menyukai apa yang kita lakukan

‘James Barrie’

Success is My Right

‘Andrie Wongso’

(...Sampai hari ini, aku berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi
kehidupanku....Semoga Tuhan menyertaiku....Amin)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria

Sujud syukurku kupanjatkan kepadaMu, atas segala anugerahMu bagiku

“ I’m nothing without You”

Alm Bapak dan Ibuku terkasih

Mas Christ, Mas Wahyu dan Mbak Lita

“ I love you all”



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI - PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertandatangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul Analisis Kontribusi, Perbandingan dari Tahun ke Tahun Serta Prediksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 24 Maret 2011 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyampaikan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Maret 2011
Yang menyatakan,

Agustinus Wibowo Amituhu

ABSTRAK

ANALISIS KONTRIBUSI, PERBANDINGAN DARI TAHUN KE TAHUN SERTA PREDIKSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2009

Agustinus Wibowo Amituhu
NIM: 06 2114 116
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2011

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) seberapa besar kontribusi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten; (2) mengetahui bagaimana perbandingan dari tahun ke tahun mulai tahun 2005 sampai tahun 2009 untuk pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Klaten; (3) prediksi jumlah Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2010 sampai tahun 2014.

Jenis penelitian adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kontribusi, angka indeks berantai dan metode kuadrat terkecil.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah selama lima tahun rata-ratanya sebesar 32,21% dan 23,58%. (2) Perbandingan dari tahun ke tahun untuk pendapatan pajak daerah pada tahun 2005 sebesar 100%; pada tahun 2006 sebesar 134,12%; hingga tahun 2009 sebesar 119,91%. Sedangkan untuk pendapatan retribusi daerah pada tahun 2005 sebesar 100%; pada tahun 2006 sebesar 96,82%, hingga pada tahun 2009 sebesar 103,91%. (3) Prediksi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Klaten untuk tahun 2010 diprediksikan sebesar Rp 22.882.976.467 dan pada tahun 2011 diprediksikan sebesar Rp 25.468.954.197 dan seterusnya hingga tahun 2014 diprediksikan sebesar Rp 33.226.887.389. Sedangkan untuk pendapatan retribusi daerah diprediksikan pada tahun 2010 sebesar Rp 33.675.390.844 pada tahun 2011 diprediksikan sebesar Rp 36.334.722.575 dan seterusnya hingga pada tahun 2014 diprediksikan sebesar Rp 44.312.717.768

ABSTRACT

CONTRIBUTION ANALYSIS, YEAR TO YEAR COMPARISON AND THE PREDICTION OF REGIONAL TAX AND RETRIBUTION TOWARD REGIONAL ORIGINAL REVENUE

A Case Study at Regency Government of Klaten, 2005-2009

AgustinusWibowoAmituhu
NIM: 06 2114 116
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2011

The aims of this study were to know (1) how big was the contribution of regional tax income and retribution toward regional original revenue at regency government of Klaten; (2) to know year to year comparison from 2005 until 2009 for regional tax income and retribution in the regency of Klaten; (3) the prediction of regional original revenue from regional tax income and retribution for 2010 to 2014.

The type of this study was case study. The writer used interview and documentation for collecting data. Analysis of contribution, chain index number and least square method were used by the writer for data analysis techniques.

The conclusion of this study showed: (1) the average of regional tax and retribution contribution was for five years 32,21% and 23,58%. (2) the year to year comparison of regional income in 2005 was 100%, in 2006 was 134,12% and 119,91% until the year of 2009. Besides, the regional retribution income in the 2005 was 100%; in 2006 was 96,82% until the year of 2009 was 103,91%. (3) the prediction of regional tax income and region retribution of Klaten regency in 2010 was Rp 22.882.976.467 and in 2011 was Rp 25.468.954.197 and so on until 2014 was predicted as much as Rp 33.226.887.389. And for regional retribution income, it was predicted as much as Rp 36.334.722.575 in 2011 and so on until 2014 it was predicted as much as Rp 44.312.717.768.

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

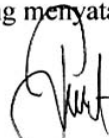
Nama : Agustinus Wibowo Amituhu

No Mahasiswa : 06 2114 116

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: ANALISIS KONTRIBUSI, PERBANDINGAN DARI TAHUN KE TAHUN, SERTA PREDIKSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Kabupaten Klaten) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hal untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal 1 April 2011
Yang menyatakan



Agustinus Wibowo Amituhu

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Kontribusi, Perbandingan Dari Tahun Ke Tahun, Serta Prediksi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Penulis sadar bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama, S.J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma.
2. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
4. Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA, selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu pegawai Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten yang telah memberikan ijin dan membantu dalam mencari data.
7. Alm Bapak Aloysius Soebekti dan Ibuku Ignatia Rudatini yang telah melahirkanku dan selalu memberikan nasehat, masukan, doa, serta kasih sayang sehingga penulis selalu termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kel. Ir. Christianto Budi Raharja yang telah memberikan kepercayaan yang besar, doa dan biaya untuk kuliah di Universitas Sanata Dharma.
9. Mas Wahyu, yang telah memberikan dukungan berupa doa, biaya untuk kost di Jogja, dan perhatiannya. Banyak pelajaran hidup yang saya dapatkan Mas.
10. Kel. Setyawan, yang tiap minggu dan tanggal tua saya repotkan dengan uang untuk ngeprint, makan, dan biaya hidup di Jogja. Terima kasih atas segala bantuannya mas.
11. Paulina Ni kadek Verdela C, yang memberikan semangat, nasehat, doa, dan segala bantuan yang tidak dapat saya ucapkan satu per satu, ingat kita harus sukses.
12. DK 5519 CD dan DK 3276 XU yang selalu setia menemani selama empat tahun ini.
13. Teman-teman Prayan boy's, Hery, Eka, Teo, Wahyu, Agu, Christ, Albert, We, dan Evry saya ucapkan terimakasih atas doa dan dukungan kalian.

14. Teman-teman Akuntansi angkatan 2006 dan teman-teman MPT yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih.
15. Sahabat-sahabatku, Adit, Aji, Eka, Famela, Rere, Wulan, Yudha, dan temen-temen kost Paingan lainnya, serta teman-teman Sidowayah lainnya terima kasih atas semangat, dorongan, dan inspirasinya.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu penulis menerima segala kritik, saran, dan masukan yang membangun atas skripsi ini, untuk tujuan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Penulis berharap skripsi yang jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 31 Maret 2011

Agustinus Wibowo Amituhu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR DIAGRAM DAN GRAFIK	xix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika penulisan	6

II. LANDASAN TEORI	8
A. Otonomi Daerah	8
1. Pengertian Otonomi Daerah	8
2. Prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah	9
3. Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah	9
B. Pendapatan Daerah	10
1. Pengertian Pendapatan Daerah	10
2. Sumber-sumber Pendapatan Daerah	10
C. Pajak	12
1. Pengertian Pajak	12
2. Fungsi Pajak	13
3. Syarat Pemungutan Pajak	14
4. Pengelompokan Pajak	15
5. Asas Pemungutan Pajak	16
D. Pajak Daerah	17
1. Pengertian Pajak Daerah	17
2. Jenis Pajak Daerah	17
3. Kriteria Pajak Daerah	24
4. Tarif Pajak Daerah	26
5. Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah	26
E. Retribusi Daerah	28
1. Pengertian Retribusi Daerah	28
2. Ciri-ciri Pokok Retribusi Daerah	29

3. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah	29
4. Jenis Retribusi Daerah	30
5. Objek Retribusi Daerah	33
6. Subjek Retribusi Daerah	34
III. METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Subjek dan Objek Penelitian	36
1. Subjek Penelitian	36
2. Objek Penelitian	36
D. Data yang Dicari	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
1. Dokumentasi	37
2. Wawancara	37
F. Teknik Analisis Data	38
1. Permasalahan Pertama	38
2. Permasalahan Kedua	38
3. Permasalahan Ketiga	39
IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KLATEN	42
A. Sejarah Klaten	42
B. Kondisi Fisik	42
1. Letak dan Luas Wilayah	42
2. Topografi	43

3. Ketinggian Daerah	44
4. Klasifikasi Tanah	44
C. Pemerintahan	45
1. Wilayah Administrasi	45
2. Kepegawaian	45
3. DPRD	45
4. Pertanahan	46
D. Penduduk	46
1. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhannya	46
E. Tenaga Kerja	47
F. Sosial	47
1. Sosial dan Pendidikan	47
2. Kesehatan	48
3. Peradilan	48
4. Agama	49
G. Pertanian	49
1. Luas Daerah	49
2. Luas Penggunaan Lahan	50
3. Pertanian Tanaman Pangan	51
4. Perkebunan	51
5. Pertenakan dan Perikanan	52
V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	53
A. Deskripsi Data	53

B. Kontribusi Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap PAD di Kabupaten Klaten	53
C. Perbandingan Dari Tahun ke Tahun Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi di Kabupaten Klaten Selama TA 2005 s/d 2006	61
D. Prediksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk TA 2010 s/d 2014	66
VI. PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Keterbatasan Penelitian	81
C. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak untuk Pajak Daerah Kabupaten/Kota...	25
Tabel 2 Subjek dan Objek Retribusi Daerah	34
Tabel 3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2005 sampai dengan tahun 2009	46
Tabel 5 Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam PAD Kabupaten Klaten Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009	54
Tabel 6 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Klaten Tahun 2005 Sampai dengan Tahun 2009	58
Tabel 7 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Klaten Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009	58
Tabel 8 Angka indeks Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam PAD Kabupaten Klaten Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009	66
Tabel 9 Perhitungan Trend Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009	70
Tabel 10 Hasil Prediksi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014	73
Tabel 11 Hasil Prediksi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014	76

Tabel 12 Prediksi Pendapatan Pajak Daerah danRetribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014	77
---	----

DAFTAR DIAGRAM DAN GRAFIK

Diagram 1 Lahan Sawah Menurut Jenis Irigasi di Kabupaten Klaten	51
Grafik 5.1 Trend Pajak Daerah Tahun 2007 s/d Tahun 2014	77
Grafik 5.2 Trend Retribusi Daerah Tahun 2007 s/d Tahun 2014	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional menurut GBHN adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Secara garis besar tujuan pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Untuk mempercepat tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan otonomi daerah yang luas kepada setiap daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Dalam rangka menerapkan sistem otonomi daerah, setiap daerah membutuhkan investasi dalam jumlah yang besar yang pelaksanaannya harus berdasar pada kemampuan daerah itu sendiri. Maka dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, suatu daerah dituntut lebih jeli dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Untuk menerapkan sistem otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, daerah otonom diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah ini, memudahkan bagi pemerintah daerah otonom untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bagi masyarakat itu sendiri adalah untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD. Selain itu, pemerintah daerah otonom harus dapat menggali segala potensi yang dimiliki

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat (Firma dkk, 2006: 35). Salah satu yang menjadi tolok ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sumber penerimaan daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Kabupaten Klaten adalah salah satu daerah yang masih sedikit dalam memiliki Pendapatan Asli Daerah. Selama kurun waktu lima tahun, yaitu tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, Kabupaten Klaten masih bergantung pada dana perimbangan. Kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah belum mampu memberikan hasil yang optimal bagi penerimaan daerah. Salah satu komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah juga belum mampu memberikan hasil yang optimal bagi Pendapatan Asli Daerah. Bahkan kontribusi retribusi daerah cenderung menurun selama lima tahun Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap keberhasilan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah. Maka dari masalah ini, penulis tertarik mengangkat judul Analisis Kontribusi Perbandingan Dari Tahun Ke Tahun Serta Prediksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana perbandingan dari tahun ke tahun mulai tahun 2005 sampai tahun 2009 untuk pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Klaten?
3. Seberapa besar prediksi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun-tahun yang akan datang yaitu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014?

C. Batasan Masalah

Pajak daerah dan retribusi daerah yang dibahas dalam skripsi ini dibatasi pada jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diberlakukan, dipungut, dan konsisten di Kabupaten Klaten selama lima tahun terakhir yakni tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.

a. Pajak daerah

Adapun jenis pajak daerah yang konsisten ada di Kabupaten Klaten selama lima tahun anggaran tersebut, antara lain:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan

6. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C,
7. Pajak parkir.

b. Retribusi daerah

Jenis retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Klaten selama lima tahun anggaran tersebut, yaitu :

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
3. Retribusi bea cetak KTP dan akte catatan sipil
4. Retribusi parkir
5. Retribusi pasar
6. Retribusi alat pemadam kebakaran
7. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
8. Retribusi grosir dan pertokoan
9. Retribusi terminal
10. Retribusi rumah pemotongan hewan
11. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
12. Retribusi ijin mendirikan bangunan
13. Retribusi ijin gangguan
14. Retribusi penyedotan kakus
15. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
16. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
17. Retribusi ijin trayek
18. Retribusi pelayanan pemakaman umum

19. Retribusi SIUP
20. Retribusi pemanfaatan lahan
21. Retribusi IUJK
22. Retribusi pengadaan barang dan jasa
23. Retribusi ijin dibidang kesehatan
24. Retribusi penyelenggaraan dibidang kepariwisataan
25. Retribusi tempat khusus parkir

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui jumlah kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten.
2. Mengetahui perbandingan dari tahun ke tahun mulai tahun 2005 sampai tahun 2009 untuk pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Klaten.
3. Meramalkan jumlah pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Klaten.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

Dari hasil penelitian ini, diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengetahui seberapa besar Pendapatan Asli Daerah yang ditunjang oleh pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya tertentu untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan dari sektor ini.

2. Bagi Penulis

Penulis dapat menerapkan teori-teori yang dipelajari kedalam praktek nyata, untuk memperdalam pemahaman penulis mengenai teori tersebut.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi di Universitas Sanata Dharma khususnya bagi para mahasiswa ataupun pembaca lain yang memerlukan informasi tertentu dalam hubungannya dengan masalah yang dibahas.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini diuraikan tentang teori-teori yang mendukung dan dipergunakan sebagai dasar dalam pengolahan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat, waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik penelitian pengumpulan data, data yang akan dicari, teknik analisis data.

Bab IV **Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten**

Bab ini berisi tentang deskripsi wilayah Kabupaten Klaten , keadaan penduduk, kondisi perekonomian, agama, dan sosial kultur pemerintahan.

Bab V **Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini membahas analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan metode dan teknik sebagaimana telah diuraikan dalam metode penelitian.

Bab VI **Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh proses pembahasan dan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan otonom daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tujuan otonomi daerah yaitu untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa, dan peran serta masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara luas, nyata, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat, dan campur tangan daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

2. Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah adalah:

a. Otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab

Arti dari seluas-luasnya adalah daerah memberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang yaitu bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan fiskal nasional, moneter, dan agama. Nyata berarti daerah telah memiliki potensi untuk merealisasi isi dan jenis otonomi yang dilimpahkan. Bertanggung jawab disini berarti otonomi yang dalam penyelenggaranya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberi otonomi.

b. Penyelenggaran otonomi yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, menjamin hubungan serasi antar daerah dan menjamin hubungan serasi antara daerah dengan pemerintah.

3. Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah

a. Masing-masing daerah tingkat II mampu mengurus rumah tangganya sendiri.

b. Semua urusan yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan layak untuk diserahkan kepada daerah tingkat II telah dilaksanakan.

- c. Perangkat peraturan berupa peraturan pemerintah tentang penyerahan urusan telah ditinjau kembali dan diselaraskan dengan urusan pembangunan yang diarahkan GBHN.
- d. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat memungkinkan untuk mendukung secara seimbang sesuai dengan kebutuhan dan dapat memungkinkan terjadinya pertumbuhan perekonomian daerah.

B. Pendapatan Daerah

1. Pengertian Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 :

Pendapatan daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

2. Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sumber Pendapatan Daerah berasal dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah menurut (Devas, 1989 : 31):

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari pungutan Pajak Daerah, pungutan jasa layanan, iuran dari penerimaan lain dinas, laba dari perusahaan daerah dan penerimaan pembangunan yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan.

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang-undang No. 25 Tahun 1999:

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang berasal dari dana penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Perimbangan terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2) Dana Alokasi Umum

Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah-daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Yang termasuk pendapatan daerah lain-lain yang sah adalah pendapatan hibah dan pendapatan darurat. Pendapatan hibah adalah

penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah Negara asing, badan atau lembaga asing, badan atau lembaga internasional, pemerintah, badan atau lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, dan peristiwa luar biasa.

d. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

C. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Andriani (Zein, 2003: 10) adalah:

Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Soemitro (Zein, 2003: 11) pajak adalah:

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa pajak mempunyai unsur-unsur :

b. Iuran kepada rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanya negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

c. Berdasarkan undang-undang dan peraturan

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

1) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

2) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Berdasarkan fungsinya pajak dibedakan atas (Mardiasmo, 2008: 1) :

a. Fungsi *Budgetair*

b. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

c. Fungsi mengatur (*regulered*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut diatas, dapat dipahami bahwa fungsi *budgetair* pajak dikaitkan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara umumnya dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat atau daerah.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2008: 2) :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan pajak harus berdasarkan pada undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

4. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu (Mardiasmo, 2008: 5) :

a. Menurut Golongannya

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

5. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak adalah (Mardiasmo, 2008: 7)

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

D. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dimana Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang dikelola oleh propinsi terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

Sedangkan untuk kabupaten atau kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bagian yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk:

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
- 4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Tidak termasuk sebagai objek pajak hotel adalah:

- 1) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- 2) Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh tamu hotel dengan pembayaran.
- 4) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel.
- 5) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan umum.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha boga atau *catering*. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah:

- 1) Pelayanan usaha jasa boga atau *catering*.

2) Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan memuji suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari satu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah:

- 1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- 2) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan adalah:

- 1) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknik terkait.
- 3) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan Galian Golongan C meliputi:

- 1) Asbes
- 2) Batu tulis

- 3) Batu setengah permata
- 4) Batu kapur
- 5) Batu apung
- 6) Batu permata
- 7) Bentonit
- 8) Dolomit
- 9) Feldspar
- 10) Batu garam (*halite*)
- 11) Grafit
- 12) Granit/andesit
- 13) Gips
- 14) Kalsit
- 15) Kaolin
- 16) Leusit
- 17) Magnesit
- 18) Mika
- 19) Marmer
- 20) Nitrat
- 21) Opsidien
- 22) Oker
- 23) Pasir dan kerikil
- 24) Pasir kuarsa
- 25) Perlit

- 26) Fosfat
- 27) Talk
- 28) Tanah serap
- 29) Tanah diatome
- 30) Tanah liat
- 31) Tawas (alum)
- 32) Tras
- 33) Yarosif
- 34) Zeolit
- 35) Basal
- 36) Trakit

Dikecualikan dari objek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah:

- 1) Kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis.
- 2) Pengambilan bahan galian golongan C lainnya yang diterapkan dalam Peraturan Daerah.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan

bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya. Tidak termasuk sebagai objek pajak parkir adalah:

- 1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- 3) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

3. Kriteria Pajak Daerah

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menciptakan objek pajak baru adalah (Saragih, 2003: 62) :

- a. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi.
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan/atau objek pajak pusat.
- e. Potensinya memadai.
- f. Tidak berdampak negatif terhadap perekonomian.

- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Jika suatu jenis pajak tidak mampu memenuhi kriteria diatas, maka pemerintah daerah tidak dapat memungut pajak kepada masyarakat. Oleh karena itu, objek jenis pajak daerah pada dasarnya sama pada semua daerah.

Tabel 2.1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak untuk Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Objek Pajak	Subjek Pajak	Wajib Pajak
Pajak Hotel	Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel	Pengusaha hotel
Pajak Restoran	Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran	Pengusaha restoran
Pajak hiburan	Orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan	Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan
Pajak Reklame	Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemasangan reklame	Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame
Pajak Penerangan Jalan	Orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik	Orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	Orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian	Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian
Pajak Parkir	Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir	Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir

Sumber: Soemarso, S. Rahardjo. Perpajakan Pendekatan Komprehensif. 2007. Jakarta. Salemba empat.

4. Tarif Pajak Daerah

Besarnya tarif yang berlaku untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan Undang-Undang tersebut. Dengan adanya pemisahan jenis pajak yang dipungut oleh propinsi dan yang dipungut oleh kabupaten atau kota diharapkan tidak adanya pengenaan pajak berganda.

Untuk penentuan besarnya tarif pajak daerah, tarif tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Ketentuan besarnya tarif Pajak Daerah ditetapkan dalam UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besarnya tarif tersebut sebagai berikut

- a. Pajak Hotel 10% (Sepuluh Persen)
- b. Pajak Restoran 10% (Sepuluh Persen)
- c. Pajak Hiburan 35% (Tiga Puluh Lima Persen)
- d. Pajak Reklame 25% (Dua Puluh Lima Persen)
- e. Pajak Penerangan Jalan 10% (Sepuluh Persen)
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (Dua Puluh Persen)
- g. Pajak Parkir 20% (Dua Puluh Persen)

5. Tolok Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah

Untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada sekarang ini dapat menggunakan berbagai ukuran, yaitu :

a. Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungutan.

b. Keadilan (*equity*)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak bersangkutan harus adil dan secara *horizontal*, artinya beban pajak haruslah sama antar berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Kemudian harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang lebih banyak memiliki sumber daya ekonomi. Pajak harus adil dari tempat ke tempat dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

c. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)

Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai dilihat konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil “beban lebih” dari pajak.

d. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*)

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha

e. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Revenue Source*)

Dalam hal ini berarti, harus jelas kepada daerah mana suatu pajak haruslah dibayarkan dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan antara daerah dari segi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

E. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah

Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah:

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi menurut (Munawir, 1990 : 4) adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.

Retribusi daerah terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan (Samudra, 1995 :51) :

- a. Adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pungutan yang dikenakan.
- b. Terdapat kebebasan dalam memilih layanan.
- c. Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

2. Ciri-ciri pokok Retribusi Daerah

Menurut (Kaho, 1997 : 152) ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah:

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang.
- b. Dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis.
- c. Adanya kontraprestasi (balas jasa) yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Dikenakan dalam setiap orang atau badan yang menggunakan jasa yang disiapkan oleh Negara atau Pemerintah.

3. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 1997, tata cara pemungutan retribusi daerah adalah:

- a. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- b. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan.
- c. Retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dalam hal ini wajib retribusi tertentu yang tidak tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulannya dari total retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

4. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Jenis-jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan (Mardiasmo, 2008: 15-16) antara lain:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- 6) Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
 - b) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
 - c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
 - d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
 - e) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
 - f) Retribusi pelayanan pasar
 - g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - i) Retribusi penggantian biaya cetak peta
 - j) Retribusi pengujian kapal perikanan
- b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi terminal
- e) Retribusi tempat khusus parkir
- f) Retribusi tempat penginapan/ pesanggarahan/villa
- g) Retribusi penyedotan kakus
- h) Retribusi tempat pemotongan hewan
- i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- j) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- k) Retribusi penyeberangan diatas air
- l) Retribusi pengolahan limbah cair
- m) Retribusi penjualan produksi daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
- 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari

perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu:

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan
- b) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
- c) Retribusi izin gangguan
- d) Retribusi izin trayek

5. Objek Retribusi Daerah

Objek Retribusi Daerah terdiri dari (Mardiasmo, 2008 : 16):

- a. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk bertujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Perizinan Tertentu

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

6. Subjek Retribusi Daerah

Berdasarkan penjelasan mengenai Objek Retribusi Daerah, maka subjek Retribusi Daerah digolongkan menjadi (Mardiasmo, 2008 : 17) :

- a. Retribusi Jasa Umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- b. Retribusi Jasa Usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Dalam menetapkan tarif retribusi ini Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk meninjau kembali tarif tersebut secara berkala dengan jangka waktu 5 tahun, dengan maksud untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah yang bersangkutan.

Tabel 2.2 Subjek dan Objek Retribusi Daerah

Objek Retribusi	Subjek Retribusi
Jasa Umum	Orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan
Jasa Usaha	Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan
Perizinan Tertentu	Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah

Sumber: Soemarso, S. Rahardjo. Perpajakan Pendekatan Komprehensif 2007. Jakarta. Salemba empat.

a. Tarif Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No.34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Dalam menetapkan tarif retribusi ini Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk meninjau kembali tarif tersebut secara berkala dengan jangka waktu lima tahun, dengan maksud untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah yang bersangkutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yaitu suatu penelitian terhadap objek tertentu dan hasil yang diperoleh dari analisis data hanya berlaku untuk objek tertentu serta dalam waktu tertentu.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek dimana data dan informasi diperoleh untuk diolah dan disajikan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Dalam penelitian ini penulis mengadakan studi kasus di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten, dengan objek data yang diteliti adalah data PAD dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2005-2009.

D. Data yang akan dicari

Data yang diperlukan untuk proses analisis data adalah Daftar Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2005 s/d 2009.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang kompeten digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari bagian-bagian yang berwenang atau sumber yang bersangkutan.

2. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat data pada Pemerintah Kabupaten Klaten. Data yang digunakan adalah jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan diteliti berupa laporan penerimaan pendapatan daerah serta peraturan daerah Kabupaten Klaten.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kuantitatif, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi masing-masing, yakni pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah, digunakan perhitungan sebagai berikut :

a. Menghitung Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

$$= \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

b. Menghitung Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

$$= \frac{\text{Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan ini dapat diketahui seberapa besar prosentase kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dan jika dari tahun ke tahun mengalami kenaikan maka dapat diartikan bahwa dari pendapatan pajak daerah atau retribusi daerah dapat memberikan kontribusi dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah, tetapi jika pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah menurun maka kontribusi yang diberikan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah juga menurun.

2. Untuk mengetahui perbandingan dari tahun ke tahun mulai tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun 2009 untuk pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Klaten, digunakan perhitungan dengan menggunakan rumus angka indeks berantai (Supranto,1991: 281).

$$I_{t,t-1} = \frac{q_t}{q_{t-1}} \times 100 \%$$

Keterangan:

I_t : Angka Indeks Pajak Daerah atau Retribusi Daerah Kabupaten Klaten

Q_t : Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah Tahun Tertentu

Q_{t-1} : Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun Sebelumnya

Dari hasil perhitungan menggunakan angka indeks berantai ini kita dapat mengetahui perbandingan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.

3. Untuk menjawab masalah terakhir ini, guna meramalkan jumlah pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah masing-masing akan menggunakan Analisis Trend (Budiyowono, 1987: 216) dengan *Least Square Method* (Metode Jumlah Kuadrat Terkecil).

$$a = \frac{\text{Jumlah } Y}{n}$$

Dimana :

Y = Jumlah realisasi pajak daerah dan retribusi daerah mulai tahun 2005 s/d tahun 2009.

n = Jumlah tahun yaitu lima tahun mulai tahun anggaran 2005 s/d tahun 2009.

a = Intercept Y saat X=0 atau besarnya pajak daerah atau retribusi daerah per tahun atau setiap satu tahun.

$$b = \frac{\text{Jumlah } XY}{\text{Jumlah } X^2}$$

Dimana :

Y = Jumlah pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah mulai tahun 2005 s/d tahun 2009

b = Jumlah kenaikan atau penurunan Y per tahun atau setiap satu tahun atau jumlah kenaikan atau penurunan jumlah pajak daerah atau retribusi daerah per tahun atau setiap tahun.

X = Tahun tertentu atau tahun 2005 s/d tahun 2009

Setelah mengetahui nilai a dan b, maka selanjutnya memasukkan nilai a dan b yang telah dihitung dengan persamaan di atas kedalam persamaan garis trend, sebagai berikut :

$$Y' = a + bX$$

Dimana :

Y' = Nilai trend pajak daerah atau retribusi daerah

X = Tahun tertentu atau tahun 2005 s/d tahun 2009

a = Jumlah Y saat X = 0 atau besarnya pajak daerah atau retribusi per tahun

b = Jumlah kenaikan atau penurunan Y per tahun atau setiap satu tahun atau jumlah kenaikan atau penurunan jumlah pajak daerah atau retribusi daerah per tahun atau setiap tahun.

Setelah memasukkan nilai a dan b ke dalam persamaan tersebut, dapat dihitung berapa prediksi jumlah pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun-tahun yang akan datang, yakni tahun 2005 s/d tahun 2009. Dimana, nilai Y' menunjukkan prediksi jumlah pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun tengah, dan dalam masalah ini tahun tengahnya adalah 2007 ($X=0$); dan nilai b menunjukkan besarnya jumlah kenaikan (nilai b positif) atau penurunan (nilai b negatif) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah per tahun.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Klaten

Pemerintah Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1950. Pelantikan anggota DPRDS (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara) dilakukan pada 28 Oktober 1950 oleh Residen Surakarta mewakili Gubernur Jawa Tengah sedangkan Pemilihan anggota DPRDS tersebut berlangsung pada tanggal 28 September 1950, sebulan menjelang pelantikan. Berdasarkan tanggal pelantikan anggota DPRDS tersebut maka tanggal 28 Oktober 1950 dijadikan tanggal Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Klaten.

B. Kondisi Fisik

1. Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. Letak Geografis wilayah Kabupaten Klaten masing-masing dibatasi oleh:

Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali

Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo

Sebelah Selatan: Kabupaten Gunung Kidul (DIY)

Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DIY)

Wilayah Kabupaten Klaten berbatasan dengan beberapa kabupaten :

Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali

Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo

Sebelah Selatan: Kabupaten Gunung Kidul (DIY)

Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DIY)

Letak Kabupaten Klaten cukup strategis karena berbatasan langsung dengan kota Surakarta, yang merupakan salah satu pusat perdagangan dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota wisata.

2. Topografi

Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 (tiga) daratan :

- a. Dataran Lereng Gunung Merapi membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung.
- b. Dataran Rendang membujur di tengah meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah merupakan dataran lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur.
- c. Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan kecamatan Bayat dan Cawas

Melihat keadaan alamnya yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung dengan banyaknya sumber air maka daerah Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang potensial disamping penghasil kapur, batu kali dan pasir yang berasal dari Gunung Merapi.

1. Ketinggian Daerah

Sekitar 3,72% terletak diantara ketinggian 0-100 meter diatas permukaan laut. Terbanyak 83,52% terletak diantara ketinggian 100-500 meter diatas permukaan laut. Sisanya 12,76% terletak diantara ketinggian 500-2.500 meter diatas permukaan laut.

2. Klasifikasi Tanah di Kabupaten Klaten

Jenis tanah terdiri dari 5 (lima) macam :

- a. Litosol : Bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat di daerah Kecamatan Bayat.
- b. Regosol Kelabu : Bahan induk abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung dan Jatinom.
- c. Grumusol Kelabu Tua : Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan.
- d. Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua : Bahan induk berupa batu kapur napal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kolikotes sebelah selatan.
- e. Regosol Coklat Kekelabuan : Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrejo, Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno dan Wedi.

C. Pemerintahan

1. Wilayah Administrasi

Kabupaten Klaten terbagi dalam 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan. Seluruh desa yang ada merupakan desa swasembada. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Cawas sebanyak 20 desa, sedangkan yang paling sedikit kecamatan Kalikotes dan Kebonarum masing-masing 7 desa.

2. Kepegawaian

Tahun 2009 jumlah pegawai negeri di lingkungan Kabupaten Klaten termasuk guru sebanyak 16.593 orang, mengalami penurunan sebesar 0,25 persen dari tahun 2008. Sedangkan bisa dilihat dari pendidikan yang ditamatkan SD sebesar 2,46 persen, lulusan SMP 4,23 persen, lulusan SMA 34,74 persen, Diploma 28,20 persen, Sarjana dan Pasca Sarjana 30,36 persen.

3. DPRD

Hasil pemilu tahun 2009 menghasilkan lima partai dengan suara terbanyak yakni PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa. Selama tahun 2009 belum ada Perda yang dihasilkan. Sedangkan sidang yang dilakukan dewan mengalami penurunan sebesar 1,66 persen bila dibandingkan dengan tahun 2008.

4. Pertanahan

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten pada tahun 2009 telah menerbitkan sertifikat sebanyak 11.781 buah. Sebanyak 94,39 persen merupakan sertifikat hak milik.

D. Penduduk

Jumlah penduduk yang besar apabila dapat dibina dan dikeluarkan sebagai tenaga yang efektif akan menjadi modal pembangunan yang besar dan sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan disegala bidang.

1. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhannya

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Klaten berdasarkan registasi tahun 2009 1.303.910 jiwa atau meningkat sebesar 3.416 jiwa dari tahun sebelumnya dan pertumbuhan sebesar 0,26 persen. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Klaten sebesar 95,79, ini berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Klaten Tahun 2005-2009

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk	Prosentase
2005	1.286.058	4.272	0,33
2006	1.293.242	7.184	0,56
2007	1.296.987	3.745	0,29
2008	1.300.494	3.507	0,27
2009	1.303.910	3.416	0,26

Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2010

Pertumbuhan jumlah penduduk seharusnya diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk. Secara umum kepadatan penduduk di kabupaten Klaten merata untuk semua kecamatan, kecuali kecamatan Kemalang yang paling rendah kepadatannya yaitu sebesar 676 jiwa per **km²**.

E. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan proses demografi. Tahun 2009 jumlah pencari kerja sebanyak 16.315 orang, mengalami penurunan sebesar 6,18 persen dibandingkan tahun 2008. Tingkat pendidikan untuk pencari kerja yang terbanyak adalah SMU/SMK sebesar 9.395 orang.

F. Sosial

1. Pendidikan dan Kebudayaan

Peningkatan Sumber Daya Manusia sekarang ini lebih di fokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengecap pendidikan, terutama penduduk usia kelompok sekolah (umur 7-24 tahun). Di Kabupaten Klaten tahun 2009 jumlah murid yang tercatat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara umum tidak banyak berbeda dibandingkan tahun 2008.

Jumlah anak putus sekolah tahun 2009 sebesar 527 orang, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Kondisi ini menunjukkan kenaikan sekitar 49,29 persen dari tahun 2008.

2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai sangat diperlukan dalam upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat.

Jumlah kematian bayi selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif, untuk tahun 2009 sebesar 125. Jumlah kelahiran bayi mengalami kenaikan sebesar 2,87 persen dibandingkan tahun 2008.

3. Peradilan

Pembangunan di bidang hukum dapat menciptakan sistem dan produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan kegiatan hukum bagi masyarakat. Tahun 2009 jumlah perkara yang masuk mengalami kenaikan sebesar 48,58 persen, sedangkan jumlah terdakwa mengalami peningkatan sebesar 48,11 persen.

Penegakan hukum masih perlu memperhatikan peningkatan pemasyarakatan hukum, aparat hukum yang berkualitas dan bertanggung jawab serta penyediaan sarana dan prasarana mendukung yang memadai, untuk terciptanya kepastian hukum dan situasi yang aman dan nyaman.

4. Agama

Kehidupan beragama yang harmonis sangat didambakan masyarakat. Hal ini terlihat dari tempat-tempat peribadatan yang ada di sekitar warga seperti masjid, gereja, dan pesantren.

Jumlah tempat peribadatan menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan jumlah pemberangkatan haji tahun 2009 sebanyak 1.035 jemaah. Mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar 25,65 persen.

G. Pertanian

1. Luas Daerah

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah 65.556 ha, terbagi dalam 26 kecamatan, 401 desa atau kelurahan. Dari 65.556 ha luas Kabupaten Klaten, 50,97 persen (33.412 ha) merupakan lahan pertanian dan 39, 29 persen (25.760 ha) merupakan lahan bukan pertanian dan sisanya 9,74 persen adalah bukan lahan pertanian. Seiring dengan perkembangan keadaan terjadi perubahan penggunaan dari lahan pertanian dan non pertanian. Hal ini ditunjukkan dari luas lahan sawah yang terus mengalami penurunan (tahun 2009; 0,03 persen), sedangkan lahan bukan pertanian mengalami kenaikan (tahun 2009; 0,03 persen).

Perubahan penggunaan lahan pertanian juga cukup besar tiap tahunnya. Tahun 2009 terjadi perubahan tanah pertanian sebesar 25.2835 ha. Dibandingkan tahun 2008 mengalami penurunan dari lahan sawah dan

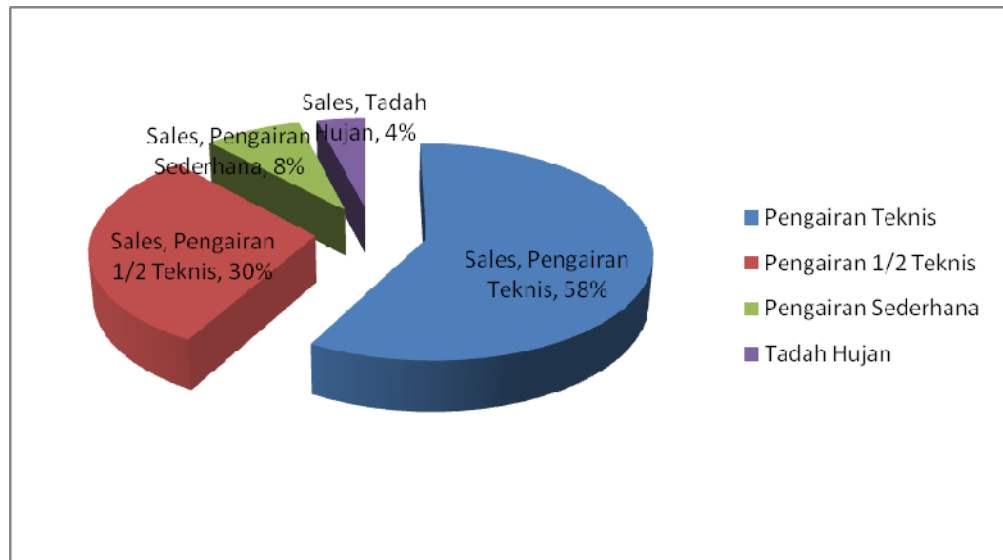
tegalan ke non pertanian sebesar 23,67 persen. Perubahan terbesar digunakan untuk bangunan dan perusahaan.

2. Luas Penggunaan Lahan

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah sebesar 65.556 ha, terbagi dalam 26 kecamatan, 401 desa/kelurahan. Dari 65.556 ha luas kabupaten Klaten, 50,97 persen (33.412 ha) merupakan lahan pertanian dan 39,29 persen (25.760 ha) , merupakan lahan bukan pertanian dan sisanya 9,74 persen adalah lahan pertanian. Seiring dengan perkembangan keadaan, terjadi perubahan penggunaan dari lahan pertanian ke non pertanian. Hal ini ditunjukkan dari luas lahan sawah yang terus mengalami penurunan (tahun 2009 ; 0,03 persen), sedangkan lahan bukan pertanian mengalami kenaikan (tahun 2009 sebesar 0,03 persen)

Perubahan penggunaan lahan pertanian juga cukup besar tiap tahunnya. Tahun 2009 terjadi perubahan tanah pertanian sebesar 25.2835 ha. Dibandingkan tahun 2008 mengalami penurunan dari lahan sawah dan tegalan ke non pertanian sebesar 23,67 persen. Perubahan terbesar digunakan untuk bangunan dan perusahaan.

Gambar 4.1
Prosentase Lahan Sawah Menurut Jenis Irigasi
di Kabupaten Klaten



3. Pertanian Tanaman Pangan

Tanaman padi merupakan salah satu hasil pertanian Kabupaten Klaten yang diunggulkan. Dilain pihak luas tanam padi sejak tahun 2001 terus mengalami penurunan, pada tahun 2009 mengalami kenaikan 6,27 persen bila di bandingkan dengan tahun 2008

Untuk luas tanaman palawija dan buah-buahan di Kabupaten Klaten mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2008. Produksi beberapa jenis sayuran dan buah-buahan secara umum juga mengalami.

4. Perkebunan

Produksi tanaman perkebunan merupakan salah satu sumber devisa sektor pertanian. Secara rata-rata produksi untuk tanaman perkebunan

mengalami penurunan. Apabila dilihat dari luas areal, luas perkebunan tembakau paling luas di banding tanaman perkebunan lainnya.

5. Peternakan dan Perikanan

Jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Klaten adalah sapi (perah/potong), kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi. Selain itu juga diusahakan unggas seperti ayam. Secara umum hasil peternakan dan perikanan mengalami kenaikan, seperti untuk sapi perah mengalami kenaikan sebesar 2,47 persen sedangkan produksi susu naik 100,38 persen.

Untuk produksi ikan pada obyek perikanan mengalami kenaikan sebesar 35,44 persen, menjadi 43.917,48 kw. Sedang nilai produksinya juga mengalami kenaikan sebesar 64,89 persen.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Klaten ini adalah untuk mengetahui mengenai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, mengetahui perbandingan dari tahun ke tahun pendapatan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Selain itu penelitian ini juga melakukan penghitungan untuk mengetahui bagaimana prediksi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Data yang digunakan untuk melakukan penghitungan adalah data realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yang didalamnya memuat data-data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari masing-masing pos pemungutan untuk tujuh jenis pajak daerah yang berlaku di Kabupaten Klaten dan dari pos retribusi daerah.

B. Kontribusi Sektor Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap PAD di Kabupaten Klaten.

Untuk melihat seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD, maka masing-masing menggunakan perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

1. Menghitung kontribusi pajak daerah terhadap PAD

$$= \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

2. Menghitung kontribusi retribusi daerah terhadap PAD

$$= \frac{\text{Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Untuk memudahkan perhitungan ini, disajikan tabel pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan total PAD mulai tahun 2005 s/d tahun 2009.

Tabel 5.1

**Realisasi Pajak daerah dan Retribusi daerah
Dalam PAD Kabupaten Klaten
Tahun 2005 S/D Tahun 2009
(Dalam Rupiah)**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
2005	33.549.822.148	9.732.205.843	10.771.625.836
2006	39.493.727.943	13.052.631.723	10.429.466.034
2007	52.110.860.092	14.638.314.886	9.995.101.398
2008	53.264.339.309	18.027.307.132	10.624.879.516
2009	54.473.674.016	20.174.756.791	11.040.689.097
Total	232.892.423.500	75.625.216.360	52.861.761.860

Sumber : Laporan Realisasi PAD Kabupaten Klaten

Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten

Klaten mulai tahun 2005 s/d tahun 2009

1. Tahun 2005

a. Kontribusi pendapatan pajak daerah Kabupaten Klaten tahun 2005

$$= \frac{\text{Rp. 9.732.205.843}}{\text{Rp. 33.549.822.148}} \times 100\%$$

$$= 29\%$$

Jadi, besarnya kontribusi pajak daerah pada tahun 2005 terhadap pendapatan asli daerah tahun 2005 sebesar 29%.

b. Kontribusi pendapatan retribusi daerah Kabupaten Klaten tahun 2005

$$= \frac{\text{Rp. 10.771.625.836}}{\text{Rp. 33.549.822.148}} \times 100\%$$

$$= 32,11\%$$

Jadi, besarnya kontribusi retribusi daerah pada tahun 2005 terhadap pendapatan asli daerah tahun 2005 sebesar 32,11%.

2. Tahun 2006

a. Kontribusi pendapatan pajak daerah Kabupaten Klaten tahun 2006

$$= \frac{\text{Rp 13.052.631.723}}{\text{Rp 39.493.727.943}} \times 100\%$$

$$= 33,05\%$$

Jadi, besarnya kontribusi pajak daerah pada tahun 2006 terhadap pendapatan asli daerah tahun 2006 sebesar 33,05%.

b. Kontribusi pendapatan retribusi daerah Kabupaten Klaten tahun 2006

$$= \frac{\text{Rp 10.429.466.034}}{\text{Rp 39.493.727.943}} \times 100\%$$

$$= 26,41\%$$

Jadi, besarnya kontribusi retribusi daerah pada tahun 2006 terhadap pendapatan asli daerah tahun 2006 sebesar 26,41%.

3. Tahun 2007

a. Kontribusi pendapatan pajak daerah Kabupaten Klaten tahun 2007

$$= \frac{\text{Rp } 14.638.314.886}{\text{Rp } 52.110.860.092} \times 100\%$$

$$= 28,09\%$$

Jadi, besarnya kontribusi pajak daerah pada tahun 2007 terhadap pendapatan asli daerah tahun 2007 sebesar 28,09%.

b. Kontribusi pendapatan retribusi daerah Kabupaten Klaten tahun 2007

$$= \frac{\text{Rp } 9.995.101.398}{\text{Rp } 52.110.860.092} \times 100\%$$

$$= 19,18\%$$

Jadi, besarnya kontribusi retribusi daerah pada tahun 2007 terhadap pendapatan asli daerah tahun 2007 sebesar 19,18%.

4. Tahun 2008

a. Kontribusi pendapatan pajak daerah Kabupaten Klaten tahun 2008

$$= \frac{\text{Rp } 18.027.307.132}{\text{Rp } 53.264.339.309} \times 100\%$$

$$= 33,84\%$$

Jadi, besarnya kontribusi pajak daerah pada tahun 2008 terhadap pendapatan asli daerah tahun 2008 sebesar 33,84%.

b. Kontribusi pendapatan retribusi daerah Kabupaten Klaten tahun 2008

$$= \frac{\text{Rp } 10.624.879.516}{\text{Rp } 53.264.339.309} \times 100\%$$

$$= 19,94\%$$

Jadi, besarnya kontribusi retribusi daerah pada tahun 2008 terhadap pendapatan asli daerah tahun 2008 sebesar 19,94%.

5. Tahun 2009

a. Kontribusi pendapatan pajak daerah Kabupaten Klaten tahun 2009

$$= \frac{\text{Rp } 20.174.756.791}{\text{Rp } 54.473.674.016} \times 100\%$$

$$= 37,04\%$$

Jadi, besarnya kontribusi pajak daerah pada tahun 2009 terhadap pendapatan asli daerah tahun 2009 sebesar 37,04%.

b. Kontribusi pendapatan retribusi daerah Kabupaten Klaten tahun 2009

$$= \frac{\text{Rp } 11.040.689.097}{\text{Rp } 54.473.674.016} \times 100\%$$

$$= 20,27\%$$

Jadi, besarnya kontribusi retribusi daerah pada tahun 2009 terhadap pendapatan asli daerah tahun 2009 sebesar 20,27%.

Hasil dari perhitungan ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.2
Kontribusi Pajak Daerah
Terhadap PAD Kabupaten Klaten
Tahun 2005 S/D Tahun 2009
(Dalam Rupiah)

Tahun	PAD	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi %
2005	33.549.822.148	9.732.205.843	29,01
2006	39.493.727.943	13.052.631.723	33,05
2007	52.110.860.092	14.638.314.886	28,09
2008	53.264.339.309	18.027.307.132	33,84
2009	54.473.674.016	20.174.756.791	37,04
Rata-rata			32,21

Sumber : Data yang diolah

Tabel 5.3
Kontribusi Retribusi Daerah
Terhadap PAD Kabupaten Klaten
Tahun 2005 S/D Tahun 2009
(Dalam Rupiah)

Tahun	PAD	Realisasi Retribusi Daerah	Kontribusi %
2005	33.857.388.000	10.771.625.836	32,11
2006	39.493.727.943	10.429.466.034	26,41
2007	52.110.860.092	9.995.101.398	19,18
2008	53.264.339.309	10.624.879.516	19,95
2009	54.473.674.016	11.040.689.097	20,27
Rata-rata			23,58

Sumber : Data yang diolah

Dari tabel diatas maka diketahui bahwa kontribusi pajak daerah dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 berkisar antara 28,09% - 37,04% dari total Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2005 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 29,01% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2006

kontribusinya naik menjadi sebesar 33,05% atau bertambah sebesar 4,04% dari tahun 2005. Pada tahun 2007 kontribusi pajak daerah turun menjadi 28,09% dibanding tahun 2006, hal ini terjadi karena peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor lain yaitu dari sektor pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang meningkat tajam sebesar Rp 8.729.295.760. Dan untuk tahun 2008 kontribusi pajak daerah adalah sebesar 33,84%, ini berarti kontribusi pajak daerah kembali naik dari kontribusi yang diberikan pada tahun 2007. Sedangkan pada tahun 2009 kontribusi pajak daerah kembali naik sebesar 37,04%, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan semua komponen pajak daerah dan pendapatan tersebut juga merupakan pendapatan tertinggi selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Untuk jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah yaitu dari pajak penerangan jalan, pajak reklame dan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Untuk pajak penerangan jalan, hal ini disebabkan karena jumlah subjek pajaknya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk pajak reklame hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah pemasangan reklame dari tahun ke tahun di Kabupaten Klaten, sedangkan untuk pajak pengambilan bahan galian golongan C disebabkan karena perubahan sistem pungutan dari sistem jemput bola beralih ke sistem penempatan anggota pemungut pajak tersebut dilokasi bahan galian dengan memungut pajak sebesar Rp 10.000 setiap truk yang mengangkut bahan

galian C. Hal ini dipandang sebagai hal yang efektif, karena dari segi pendapatan pada tahun 2007 ke tahun 2008 pendapatan dari pajak pengambilan bahan galian golongan C meningkat sebesar Rp 545.784.054

Untuk kontribusi retribusi daerah dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 berkisar antara 19,18%- 32,11% dari total Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2005 retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 32,11% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun pada tahun 2006 kontribusi yang diberikan turun menjadi 26,41% atau berkurang sebesar 5,7% dari tahun 2005, hal ini karena penurunan pendapatan retribusi daerah dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2006. Pada tahun 2007 kontribusinya turun lagi menjadi sebesar 19,18% dibandingkan tahun 2006. Dan untuk tahun 2008 kontribusi yang diberikan dari pendapatan retribusi daerah adalah sebesar 19,95%, ini berarti kontribusi naik dari kontribusi yang diberikan pada tahun 2007. Sedangkan pada tahun 2009 kontribusi yang diberikan kembali naik sebesar 0,32% dari tahun 2008, maka kontribusi yang diberikan menjadi sebesar 20,27%. Dari keterangan diatas maka pajak daerah memberikan rata-rata kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yaitu sebesar 32,21%, sedangkan untuk retribusi daerah sebesar 23,58%. Hal ini

disebabkan dari tahun ke tahun ada beberapa jenis retribusi yang dihapus, sebagai contoh penghapusan retribusi bea cetak KTP dan akte Capil.

Faktor-faktor yang menyebabkan kontribusi pajak daerah tidak memberikan hasil yang optimal bagi Pendapatan Asli Daerah karena di Kabupaten Klaten tidak memiliki potensi daerah yang dapat menunjang pendapatan dari sektor pajak daerah, misalkan dari pajak hiburan, pajak hotel dan pajak restoran. Kabupaten Klaten bukan merupakan daerah wisata, dimana pajak yang terkait dibidang Kepariwisata tersebut tidak memberikan kontribusi yang optimal bagi pendapatan pajak daerah.

C. Perbandingan Dari Tahun Ke Tahun Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Klaten selama Tahun Anggaran 2005 s/d Tahun Anggaran 2009

Dalam laporan realisasinya, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten dari sektor pajak dan retribusi daerah selama lima tahun mulai dari tahun 2005 s/d tahun 2009 selalu meningkat kecuali pendapatan retribusi daerah yang sempat menurun pada tahun 2006, 2007 dan kembali meningkat pada tahun 2008 dan 2009.

Perkembangan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah ini dapat dilihat berdasarkan angka indeks pajak daerah dan retribusi daerah pada

masing-masing tahun anggaran. Dengan menggunakan angka indeks berantai ini bisa diketahui naik turunnya hasil dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Angka indeks berantai ini berfungsi sebagai angka perbandingan yang perubahan relatifnya dinyatakan dalam bentuk prosentase terhadap yang lain, dengan memilih tahun 2005 sebagai tahun dasarnya.

Berdasarkan data tabel 5.1 dan 5.2 perhitungan angka indeks berantai untuk pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut (Supranto , 1991 : 281):

$$I_{t,t-1} = \frac{q_t}{q_{t-1}} \times 100 \%$$

Dimana :

I_t = Angka Indeks Pajak Daerah atau Retribusi Daerah Kabupaten
Klaten

q_t = Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah
Tahun Tertentu

q_{t-1} = Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah
Kabupaten Klaten Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data tabel 5.2 dan 5.3 diatas maka perhitungan angka indeks pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Klaten dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2005

- a. Angka Indeks Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005 adalah:

$$I_{2005, 2005} = \frac{\text{Rp } 9.732.205.843}{\text{Rp } 9.732.205.843} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

- b. Angka Indeks Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005 adalah:

$$I_{2005, 2005} = \frac{\text{Rp } 10.771.625.836}{\text{Rp } 10.771.625.836} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

2. Tahun 2006

- a. Angka Indeks Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 adalah:

$$I_{2006, 2005} = \frac{\text{Rp } 13.052.631.723}{\text{Rp } 9.732.205.843} \times 100\%$$

$$= 134,12\%$$

Jadi, pendapatan pajak daerah pada tahun 2006 menunjukkan kenaikan sebesar 34,12% dibandingkan pendapatan pajak daerah tahun 2005.

- b. Angka Indeks Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 adalah:

$$I_{2006, 2005} = \frac{\text{Rp } 10.429.466.034}{\text{Rp } 10.771.625.836} \times 100\%$$

$$= 96,82 \%$$

Jadi, pendapatan retribusi daerah pada tahun 2006 menunjukkan penurunan sebesar 3,18% dibanding tahun 2005.

3. Tahun 2007

- a. Angka Indeks Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 adalah:

$$I_{2007, 2006} = \frac{\text{Rp } 14.638.314.886}{\text{Rp } 13.052.631.723} \times 100\%$$

$$= 112,15\%$$

Jadi, pendapatan pajak daerah pada tahun 2007 menunjukkan kenaikan sebesar 12,15% dibandingkan pendapatan pajak daerah tahun 2006.

- b. Angka Indeks Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 adalah:

$$I_{2007, 2006} = \frac{\text{Rp } 9.995.101.398}{\text{Rp } 10.429.466.034} \times 100\%$$

$$= 95,83\%$$

Jadi, pendapatan retribusi daerah pada tahun 2007 menunjukkan penurunan sebesar 4,17% dibandingkan pendapatan retribusi daerah tahun 2006

4. Tahun 2008

- a. Angka Indeks Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 adalah:

$$I_{2008, 2007} = \frac{\text{Rp } 18.027.307.132}{\text{Rp } 14.638.314.886} \times 100\%$$

$$= 123,15\%$$

Jadi, pendapatan pajak daerah pada tahun 2008 menunjukkan kenaikan sebesar 23,15% dibandingkan pendapatan pajak daerah tahun 2007.

- b. Angka Indeks Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 adalah:

$$I_{2008, 2007} = \frac{\text{Rp } 10.624.879.516}{\text{Rp } 9.995.101.398} \times 100\%$$

$$= 106,30\%$$

Jadi, pendapatan retribusi daerah pada tahun 2008 mengalami kenaikan 6,30% dibandingkan pendapatan retribusi daerah tahun 2007

5. Tahun 2009

- a. Angka Indeks Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 adalah:

$$I_{2009, 2008} = \frac{\text{Rp } 20.174.756.791}{\text{Rp } 18.027.307.132} \times 100\%$$

$$= 119,91\%$$

Jadi, pendapatan pajak daerah pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 19,91% dibandingkan pendapatan pajak daerah tahun 2008

- b. Angka Indeks Pendapatan Retribusi Daerah Kabupten Klaten Tahun 2009 adalah:

$$I_{2009,2008} = \frac{\text{Rp } 11.040.689.097}{\text{Rp } 10.624.879.516} \times 100\%$$

$$= 103,91\%$$

Jadi, pendapatan retribusi daerah pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 3,91% dibandingkan pendapatan retribusi daerah tahun 2008.

Dari hasil perhitungan angka indeks pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.4
Angka Indeks Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dalam PAD Kabupaten Klaten
Tahun 2005 s/d Tahun 2009

Tahun	Pajak Daerah		Retribusi Daerah	
	Realisasi (Rp)	Angka Indeks	Realisasi (Rp)	Angka Indeks
$I_{2005,2005}$	9.732.205.843	100%	10.771.625.836	100%
$I_{2006,2005}$	13.052.631.723	134,12%	10.429.466.034	96,82%
$I_{2007,2006}$	14.638.314.886	112,15%	9.995.101.398	95,83%
$I_{2008,2007}$	18.027.307.132	123,15%	10.624.879.516	106,30%
$I_{2009,2008}$	20.174.756.791	119,91%	11.040.689.097	103,91%

Sumber : Data yang diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbandingan pendapatan pajak daerah dari tahun ke tahun mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Pada tahun 2005 angka indeks pendapatan pajak daerah adalah sebesar 100%. Untuk angka indeks pendapatan pajak daerah tahun 2006 mengalami kenaikan menjadi sebesar 134,12% yang artinya bahwa pendapatan pajak daerah pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 34,12% dibandingkan pendapatan

pajak daerah tahun 2005. Untuk angka indeks pendapatan pajak daerah tahun 2007 sebesar 112,15%. Yang berarti pendapatan pajak daerah pada tahun 2007 naik sebesar 12,15% dibandingkan pendapatan pajak daerah pada tahun 2006. Dan untuk tahun tahun 2008 angka indeks sebesar 123,15% yang artinya bahwa pendapatan pajak daerah pada tahun 2008 naik sebesar 23,15% dibanding dengan pendapatan pajak daerah tahun 2007. Sedangkan pada tahun 2009 angka indeks pendapatan pajak daerah sebesar 119,91%, ini berarti bahwa pendapatan pajak daerah tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 19,91% dibandingkan pendapatan pajak daerah tahun 2008.

Untuk perbandingan pendapatan retribusi daerah dari tahun ke tahun mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Pada tahun 2005 perbandingan angka indeks pendapatan retribusi daerah adalah sebesar 100%. Untuk angka indeks pendapatan retribusi daerah tahun 2006 mengalami penurunan menjadi sebesar 96,82% yang artinya bahwa pendapatan retribusi daerah pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 3,18% dibandingkan pendapatan retribusi daerah pada tahun 2005. Untuk angka indeks pendapatan retribusi daerah pada tahun 2007 sebesar 95,83%. Yang berarti bahwa pendapatan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 4,17% dibandingkan pendapatan retribusi daerah pada tahun 2006. Dan untuk angka indeks tahun 2008 naik menjadi sebesar 106,30%, yang berarti bahwa pendapatan retribusi daerah pada tahun 2008 naik sebesar 6,30% dibandingkan pendapatan retribusi daerah tahun 2007. Sedangkan tahun 2009 angka indeks pendapatan retribusi daerah sebesar 103,91%, ini berarti bahwa pendapatan retribusi daerah tahun 2009

mengalami kenaikan sebesar 3,91% dibandingkan pendapatan retribusi daerah tahun 2008.

D. Prediksi PAD Kabupaten Klaten Dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Tahun Anggaran 2010 Sampai dengan Tahun 2014.

Untuk mengetahui jumlah pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun-tahun yang akan datang, akan digunakan perhitungan peramalan dengan analisis trend dengan metode *Least Square* (Jumlah kuadrat terkecil), dengan persamaan garis trend yang digunakan adalah $Y' = a + bX$

Adapun langkah-langkah dalam perhitungan trend tersebut, antara lain:

1. Menentukan nilai a dengan rumus :

$$a = \frac{\text{Jumlah Y}}{n}$$

Dimana ;

a = Jumlah Y saat X = 0 atau besarnya pajak daerah atau retribusi daerah (Y) pada saat X = 0

Y = Jumlah realisasi pajak daerah atau retribusi daerah mulai tahun 2005 s/d tahun 2009.

n = Jumlah tahun yaitu lima tahun mulai tahun anggaran 2005 s/d tahun anggaran 2009.

2. Menentukan nilai b dengan rumus :

$$b = \frac{\text{Jumlah } XY}{\text{Jumlah } X^2}$$

Dimana ;

Y = Jumlah realisasi pajak daerah atau retribusi daerah mulai tahun 2005
s/d tahun 2009

b = Jumlah kenaikan atau penurunan Y per tahun atau setiap satu tahun
atau jumlah kenaikan atau penurunan jumlah pajak daerah atau
retribusi daerah per tahun atau setiap tahun.

X = Tahun

3. Menentukan persamaan garis trend dengan rumus :

$$Y' = a + bX$$

Dimana ;

Y' : Nilai trend pajak daerah atau retribusi daerah

4. Melakukan peramalan dengan menggunakan persamaan garis trend yang telah dihitung pada langkah ketiga di atas.

Berikut ini adalah format perhitungan trend pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 2005 s/d Tahun 2009 :

Berdasarkan data pada tabel 1 maka prediksi jumlah PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun 2005 s/d tahun 2009 dapat diketahui dengan perhitungan, sebagai berikut :

Tabel 5.5
Perhitungan Trend Pajak daerah dan Retribusi daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2005 s/d Tahun 2009

Tahun	Y		X	X ²	XY	
	Pajak Daerah (Dalam Rupiah)	Retribusi Daerah (Dalam Rupiah)			Pajak Daerah (Dalam Rupiah)	Retribusi Daerah (Dalam Rupiah)
2005	9.732.205.843	10.771.625.836	-2	4	-19.464.411.690	-21.543.251.660
2006	13.052.631.723	10.429.466.034	-1	1	-13.052.631.723	-10.429.466.034
2007	14.638.314.886	9.995.101.398	0	0	0	0
2008	18.027.307.132	10.624.879.516	1	1	18.027.307.132	10.624.879.516
2009	20.174.756.791	11.040.689.097	2	4	40.349.513.580	22.081.378.180
Jumlah	75.625.216.375	52.861.761.881	0	10	25.859.777.305	733.540.004

a. Analisis Trend Pajak daerah

1. Menentukan nilai a

$$a = \frac{\text{Jumlah Y}}{n}$$

$$= \frac{75.625.216.375}{5}$$

$$= 15.125.043.275$$

Nilai a = 15.125.043.275 menunjukkan besarnya jumlah pendapatan pajak daerah (Y) pada saat nilai X=0

2. Menentukan nilai b

$$\begin{aligned}
 b &= \frac{\text{Jumlah } XY}{\text{Jumlah } X^2} \\
 &= \frac{25.859.777.305}{10} \\
 &= 2.585.977.731
 \end{aligned}$$

Nilai $b = 2.585.977.731$ menunjukkan besarnya jumlah kenaikan pendapatan pajak daerah per tahun, atau setiap satu tahun terjadi kenaikan pendapatan pajak daerah sebesar Rp 2.585.977.731

3. Menentukan persamaan garis trend

Berdasarkan nilai a dan b yang telah dihitung pada langkah sebelumnya, maka persamaan garis trend pajak daerah adalah :

$$Y' = a + bX$$

$$Y' = 15.125.043.275 + 2.585.977.731X$$

4. Melakukan peramalan berdasarkan persamaan garis trend pajak daerah

$$Y' = 15.125.043.275 + 2.585.977.731X$$

Berdasarkan persamaan garis trend ini, kita dapat mengadakan prediksi jumlah pendapatan pajak daerah pada tahun-tahun yang akan datang.

Hasil perhitungan prediksi jumlah pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran 2005 s/d tahun anggaran 2009 adalah, sebagai berikut:

Tahun 2010

$$Y' = 15.125.043.275 + 2.585.977.731 (3)$$
$$= 22.882.976.467$$

Jumlah pendapatan pajak daerah pada tahun 2010 diprediksikan sebesar Rp 22.882.976.467

Tahun 2011

$$Y' = 15.125.043.275 + 2.585.977.731 (4)$$
$$= 25.468.954.197$$

Jumlah pendapatan pajak daerah pada tahun 2011 diprediksikan sebesar Rp 25.468.954.197

Tahun 2012

$$Y' = 15.125.043.275 + 2.585.977.731 (5)$$
$$= 28.054.931.928$$

Jumlah pendapatan pajak daerah pada tahun 2012 diprediksikan sebesar Rp 28.054.931.928

Tahun 2013

$$Y' = 15.125.043.275 + 2.585.977.731 (6)$$
$$= 30.640.909.658$$

Jumlah pendapatan pajak daerah pada tahun 2013 diprediksikan sebesar Rp 30.640.909.658

Tahun 2014

$$Y' = 15.125.043.275 + 2.585.977.731 (7)$$

$$= 33.226.887.389$$

Jumlah pendapatan pajak daerah pada tahun 2014 diprediksikan sebesar Rp 33.226.887.389

Tabel 5.6
Hasil Perhitungan
Prediksi Pendapatan Pajak Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2010 s/d Tahun 2014
(Dalam Rupiah)

Tahun	Prediksi Pendapatan Pajak Daerah
2010	22.882.976.467
2011	25.468.954.197
2012	28.054.931.928
2013	30.640.909.658
2014	33.226.887.389

Sumber : Data yang diolah

b. Analisis Trend Retribusi daerah

1. Menentukan nilai a

$$a = \frac{\text{Jumlah Y}}{n}$$

$$= \frac{52.861.761.881}{5}$$

$$= 10.572.352.376$$

Nilai $a = 10.572.352.376$ menunjukkan besarnya jumlah pendapatan retribusi daerah (Y) pada saat nilai $X=0$

2. Menentukan nilai b

$$\begin{aligned} b &= \frac{\text{Jumlah } XY}{\text{Jumlah } X^2} \\ &= \frac{733.540.004}{10} \\ &= 73.354.000 \end{aligned}$$

Nilai $b = 73.354.000$ menunjukkan besarnya jumlah kenaikan pendapatan retribusi daerah per tahun, atau setiap satu tahun terjadi kenaikan pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 73.354.000

3. Menentukan persamaan garis trend

Berdasarkan nilai a dan b yang telah dihitung pada langkah sebelumnya, maka persamaan garis trend retribusi daerah adalah :

$$Y' = a + bX$$

$$Y' = 10.572.352.376 + 73.354.000X$$

4. Melakukan peramalan berdasarkan persamaan garis trend retribusi daerah

$$Y' = 10.572.352.376 + 73.354.000X$$

Berdasarkan persamaan garis trend ini, kita dapat mengadakan prediksi jumlah pendapatan retribusi daerah pada tahun-tahun yang akan datang. Hasil perhitungan prediksi jumlah pendapatan retribusi daerah

pada tahun anggaran 2005 s/d tahun anggaran 2009 adalah, sebagai berikut :

Tahun 2010

$$\begin{aligned} Y' &= 10.572.352.376 + 73.354.000 \text{ (3)} \\ &= 10.792.414.377 \end{aligned}$$

Jumlah pendapatan retribusi daerah pada tahun 2010 diprediksikan sebesar Rp 10.729.414.377

Tahun 2011

$$\begin{aligned} Y' &= 10.572.352.376 + 73.354.000 \text{ (4)} \\ &= 10.865.768.378 \end{aligned}$$

Jumlah pendapatan retribusi daerah pada tahun 2011 diprediksikan sebesar Rp 10.865.768.378

Tahun 2012

$$\begin{aligned} Y' &= 10.572.352.376 + 73.354.000 \text{ (5)} \\ &= 10.939.122.378 \end{aligned}$$

Jumlah pendapatan retribusi daerah pada tahun 2012 diprediksikan sebesar Rp 10.939.122.378

Tahun 2013

$$\begin{aligned} Y' &= 10.572.352.376 + 73.354.000 \text{ (6)} \\ &= 11.012.476.379 \end{aligned}$$

Jumlah pendapatan retribusi daerah pada tahun 2013 diprediksikan sebesar Rp 11.012.476.379

Tahun 2014

$$Y' = 10.572.352.376 + 73.354.000 (7)$$

$$= 11.085.830.379$$

Jumlah pendapatan retribusi daerah pada tahun 2014 diprediksikan sebesar Rp 11.085.830.379

Tabel 5.7
Hasil Perhitungan
Prediksi Pendapatan Retribusi Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2010 s/d Tahun 2014
(Dalam Rupiah)

Tahun	Prediksi Penerimaan Retribusi Daerah
2010	10.792.414.377
2011	10.865.768.378
2012	10.939.122.378
2013	11.012.476.379
2014	11.085.830.379

Sumber : Data yang diolah

Dari hasil peramalan ini diketahui bahwa jumlah pendapatan pajak daerah terus meningkat, namun untuk retribusi daerah hasil peramalan tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan hasil yang lebih sedikit dibanding hasil tahun 2009 yang sebesar Rp 11.040.689.097. Hal ini menunjukkan, agar ada upaya dari dinas terkait untuk meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi daerah, sehingga pendapatan dari retribusi

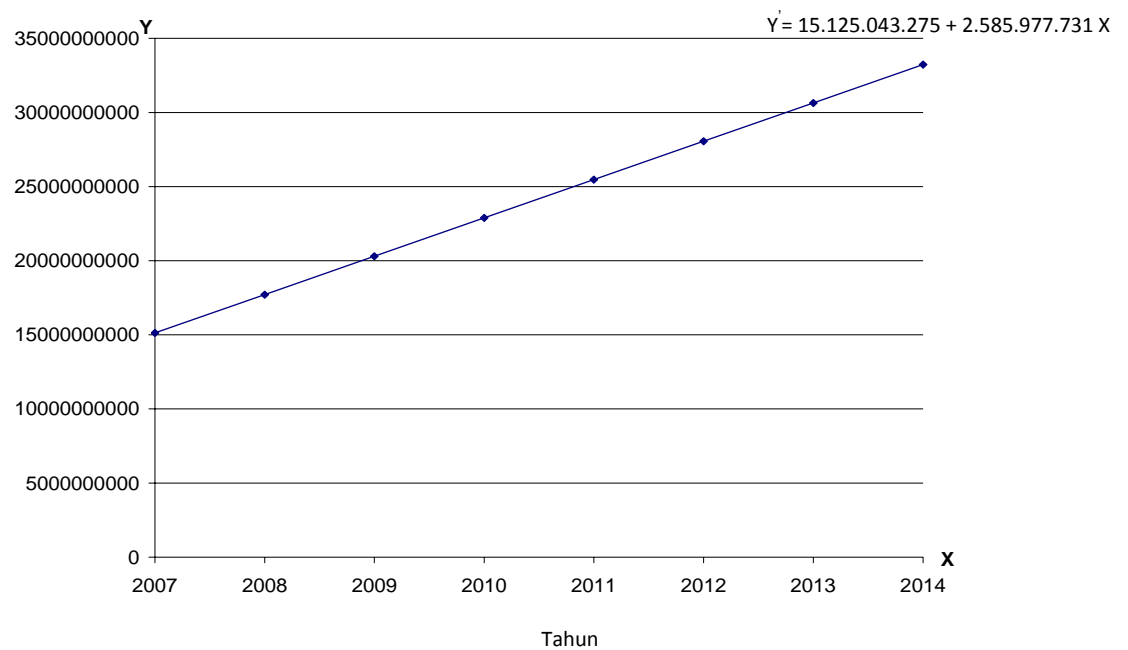
daerah dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 5.8
Prediksi Pendapatan Asli Daerah
Dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2010 s/d Tahun 2014
(Dalam Rupiah)

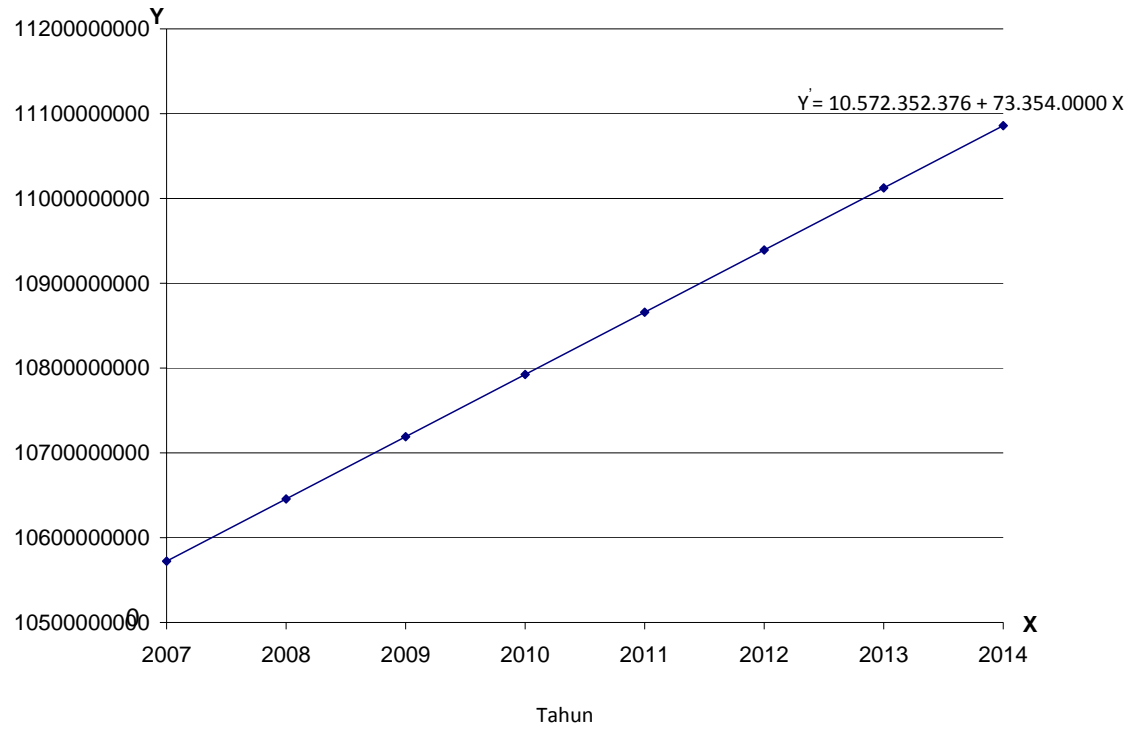
Tahun	Prediksi	
	Pajak daerah	Retribusi daerah
2010	22.882.976.467	10.792.414.377
2011	25.468.954.197	10.865.768.378
2012	28.054.931.928	10.939.122.378
2013	30.640.909.658	11.012.476.379
2014	33.226.887.389	11.085.830.379

Sumber: Data yang diolah

Gambar 5.1
Trend Pajak Daerah Tahun 2007 s/d Tahun 2014



Gambar 5.2
Trend Retribusi Daerah Tahun 2007 s/d Tahun 2014



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1a. Besarnya kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut: tahun 2005 sebesar 29,01%, tahun 2006 sebesar 33,05%, tahun 2007 sebesar 28,09%, tahun 2008 sebesar 33,84%, dan tahun 2009 sebesar 37,04%. Sedangkan rata-rata kontribusi pajak daerah selama lima tahun tersebut yaitu sebesar 32,21%.
- b. Besarnya kontribusi pendapatan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut; tahun 2005 sebesar 32,11%, tahun 2006 sebesar 26,41%, tahun 2007 sebesar 19,18%, tahun 2008 sebesar 19,95%, dan tahun 2009 sebesar 20,27%. Sedangkan rata-rata kontribusinya selama lima tahun tersebut yaitu sebesar 23,58%.
- 2a. Perbandingan pendapatan pajak daerah pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 34,12% dibandingkan tahun 2005. Pada tahun 2007 pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 12,15% dibandingkan tahun 2006. Pada tahun 2008 pendapatan pajak daerah

mengalami kenaikan sebesar 23,15% dibandingkan pendapatan pajak daerah tahun 2007, dan pada tahun 2009 pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 19,91% dibandingkan pendapatan pajak daerah tahun 2008.

- b. Perbandingan pendapatan retribusi daerah pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 3,18% dibandingkan pendapatan retribusi daerah tahun 2005. Pada tahun 2007 pendapatan retribusi daerah mengalami penurunan dibandingkan pendapatan retribusi daerah tahun 2006 sebesar 4,17%. Pada tahun 2008 pendapatan retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 6,30% dibandingkan pendapatan retribusi daerah tahun 2007, dan pada tahun 2009 pendapatan retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 3,91% dibanding pendapatan retribusi daerah tahun 2008.
- 3a. Prediksi pendapatan pajak daerah Kabupaten Klaten tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2010 pendapatan pajak daerah diprediksikan sebesar Rp 22.882.976.467, pada tahun 2011 sebesar Rp 25.468.954.197, pada tahun 2012 sebesar Rp 28.054.931.928, pada tahun 2013 sebesar Rp 30.640.909.658 dan pada tahun 2014 sebesar Rp 33.226.887.389
 - b. Prediksi pendapatan retribusi daerah Kabupaten Klaten juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 2010 prediksi pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 10.792.414.377, pada tahun 2011 Rp 10.865.768.378, pada tahun 2012 sebesar Rp 10.939.122.378, pada tahun 2013 sebesar Rp

11.012.476.379 dan pada tahun 2014 pendapatan retribusi daerah diprediksikan sebesar Rp 11.085.830.3795.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Klaten Penulis menghadapi keterbatasan-keterbatasan penelitian sebagai berikut :

1. Dalam melakukan penelitian, data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten hanya melalui teknik wawancara dan dokumentasi, sehingga fakta-fakta yang sebenarnya terjadi serta analisis dan hasil analisis ini signifikan hanya pada data-data dari dinas tersebut.
2. Data yang ada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten yang berupa Daftar Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten hanya berjumlah satu dan tidak ada salinannya sehingga banyak dokumen yang hilang.

C. Saran

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini belum sempurna, namun dengan hasil penelitian ini penulis memberikan saran yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten:

1. Dengan melihat dari hasil dari angka indeks yang penulis buat, maka dengan perkembangan seperti ini, Pemerintah Daerah Kabupaten

Klaten perlu melakukan kajian-kajian dan evaluasi kembali terhadap proses dan hasil yang telah dicapai untuk mengetahui apakah hasil ini sudah cukup optimal dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

2. Data-data yang ada diharapkan untuk disimpan dalam database sehingga tidak mudah hilang dan dibuat daftar peminjam atau peneliti yang menggunakan data-data tersebut, sehingga apabila ada data yang hilang mudah ditelusuri.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dan efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
4. Untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian yang sama dengan membandingkan sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 dengan ada beberapa tambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang baru seperti pajak rokok, pajak sarang burung walet, PBB pedesaan kota atau kabupaten, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, retribusi tera, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pelayanan pendidikan dan retribusi izin usaha perikanan, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih luas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam

arti Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi Pendapatan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedijoewono, Noegroho. 1999. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Devas, Nick. 1987. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* (Maris Masri, 1989, Penerjemah). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Indriantoro dan Supomo. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Jogiyanto. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Kaho, Joseph Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Klaten Dalam Angka. 2010. Klaten: *Badan Pusat Statistik Klaten*.
- Koriyanti, Kota. 2005. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Mahsun, M. Firma S., H. Andre P., 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Munawir, Slamet. 1990. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 2004, “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2001, “Tentang Pajak Daerah”.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2001, “Tentang Retribusi Daerah”.
- Radiyo, Thomas. 2005. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Ritonga, Abdulrahman. 1987. *Statistika Terapan Untuk Penelitian Lembaga*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Samudra, Azhari. 1995. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Siregar, Baldric. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.

- Soemarso, S. Rahardjo. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subagyo, Pangestu. 2003. *Statistik Deskriptif Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE
- Suharyadi. 2007. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supranto, J. 1991. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Susanto, Hery. 2003. Kontribusi Perkembangan dan Prediksi Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Jln Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Lt. 2 Telp. (0272)321046 Psw 314-318 Faks 328730
KLATEN 57424

Nomor : 072/475/X/09
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan tentang Penelitian

Klaten, 19 Oktober 2010
Kepada Yth.
Ka. DPPKAD Kab. Klaten
Di

Tempat

Menunjuk Surat dari Ketua Program Studi Akuntansi Fak. Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Nomor: 31/Kaprodi Akt/731/X/2010 Tanggal 07 Oktober 2010 Perihal Ijin Penelitian, dengan hormat kami beritahukan bahwa di Wilayah/Instansi Saudara akan dilaksanakan Penelitian :

Nama : *Agustinus Wibowo Amituhu*
Alamat : *Mrican, Yogyakarta*
Pekerjaan/Mahasiswa : *Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*
Penanggungjawab : *Drs. Yusef Widya Karsana, MSI, Akt, QIA*
Jenis Penelitian : *Survey*
Judul / topik : *Analisis Kontribusi, Perbandingan dari Tahun ke Tahun Serta Prediksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*
Jangka Waktu : *3 bulan (tgl. 19 Oktober 2010 s/d 19 Januari 2011)*
Catatan : *Menyerahkan Hasil Penelitian berupa hard copy dan soft copy ke Bidang PEPP/ Litbang BAPPEDA Kabupaten Klaten*

Besar harapan kami, agar Saudara berkenan memberikan bantuan seperlunya

An. BUPATI KLATEN
Kepala BAPPEDA Kabupaten Klaten
Ub. Sekretaris



Tembusan Kepada Yth :

1. Ka. Badan Kesbangpolinmas Kab. Klaten
2. Ka. BPS Kab. Klaten
3. Ketua Prodi Akuntansi Fak. Ekonomi USD Yogyakarta
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

DAFTAR ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN : 2004 S/D 2008

No.	Jenis Pendapatan	2004		2005		2006		2007		2008	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	POS 1.2.1. PAJAK DAERAH										
1	Pajak Hotel dan Restoran	65,000,000	81,350,100	125,000,000	97,400,548	100,000,000	69,297,405	100,000,000	111,449,235	100,000,000	127,591,750
2	Pajak Restoran dan Leschan	60,000,000	60,139,150	60,000,000	71,255,432	100,000,000	121,525,101	125,000,000	129,423,552	200,000,000	177,343,862
3	Pajak Hiburan	45,000,000	47,060,500	60,000,000	72,273,310	270,000,000	290,658,206	450,000,000	450,765,967	600,000,000	679,721,263
4	Pajak Reklame	500,000,000	545,775,995	700,000,000	720,111,372	600,000,000	739,304,785	900,000,000	1,202,095,892	1,250,000,000	1,124,500,346
5	Pajak Penerangan Jalan	9,200,000,000	9,400,433,201	10,000,000,000	8,478,834,304	10,100,000,000	11,489,463,953	11,400,000,000	12,195,335,081	13,000,000,000	14,798,651,965
6	Pajak Pemakaian Bahan Galian Gol C	80,000,000	85,765,534	100,000,000	227,216,782	255,000,000	290,164,715	300,000,000	481,512,691	1,000,000,000	1,027,296,745
7	Pajak Pemakaian ABT dan AP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pajak Parkir	65,000,000	71,010,907	70,000,000	65,114,095	65,000,000	52,217,558	65,000,000	67,734,468	80,000,000	92,111,001
	JUMLAH	10,015,000,000	10,291,535,387	11,115,000,000	9,732,205,843	11,490,000,000	13,052,631,723	13,340,000,000	14,638,314,886	16,230,000,000	18,027,307,132
II	POS 1.2.2. RETRUBUSI DAERAH										
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	2,220,650,000	2,057,384,395	2,568,020,000	2,052,972,060	3,485,620,000	2,945,241,750	3,485,620,000	3,323,694,055	4,317,600,000	3,784,519,020
2	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	203,337,000	215,358,100	235,000,000	236,515,450	232,500,000	226,591,530	240,500,000	238,718,140	272,375,000	258,844,830
3	Ret. Bea Cetak KTP & Akte Capil	1,654,000,000	1,280,405,000	2,200,000,000	2,581,294,900	1,582,000,000	1,774,954,600	341,032,000	376,354,800	69,015,000	72,429,000
4	Ret. Parkir	260,969,000	259,298,000	280,000,000	260,971,200	280,000,000	290,552,100	345,000,000	345,142,100	598,181,000	518,588,400
5	Ret. Pemas	1,490,000,000	1,468,837,085	1,844,000,000	1,882,787,120	1,869,500,000	1,842,542,445	2,002,306,000	2,086,739,330	2,571,700,000	2,178,717,830
6	Ret. Alat Pemadam Kebakaran	5,100,000	5,280,000	5,720,000	5,202,000	5,700,000	5,726,500	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000
7	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	451,604,000	450,262,520	571,042,000	556,829,345	581,970,000	601,139,250	750,072,000	693,736,500	1,367,882,000	720,402,930
8	Ret. Pasar Grosir dan Partokolan	467,000,000	471,072,930	506,000,000	473,760,260	461,000,000	461,372,118	465,000,000	461,372,118	450,390,000	475,181,050
9	Ret. Terminal	210,000,000	210,180,700	231,000,000	197,472,860	205,000,000	182,530,790	205,000,000	172,370,500	205,000,000	151,403,500
10	Ret. RPH	132,600,000	7,523,500	132,000,000	91,210,500	101,000,000	86,104,750	137,500,000	86,657,750	111,512,000	88,476,500
11	Ret. Tempat Rekreasi dan Olah Raga	686,750,000	762,768,773	819,500,000	826,040,477	397,250,000	362,418,600	422,860,000	408,500,000	532,125,000	452,375,750
12	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	325,000,000	346,067,189	490,000,000	435,137,644	425,300,000	350,310,687	455,300,000	412,228,362	500,000,000	551,882,557
13	Ret. Ijin Grogangan	120,000,000	131,318,925	165,000,000	256,092,220	194,650,000	215,419,260	215,000,000	282,954,070	215,000,000	428,361,945
14	Ret. Penyedotan Kakuas	14,575,000	15,065,000	16,000,000	16,180,000	17,000,000	19,465,000	20,000,000	19,650,000	23,050,000	26,480,000
15	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	33,333,000	33,362,300	64,990,000	53,000,000	60,000,000	60,000,000	66,000,000	66,000,000	116,200,000	110,290,000
16	Ret. Penjualan Kendaraan Bermotor	480,635,000	491,602,500	510,000,000	516,395,500	531,340,000	526,282,060	533,337,200	565,653,000	543,587,000	565,960,500
17	Ret. Ijin Trayek	9,365,000	8,779,700	9,900,000	11,614,000	8,660,000	8,720,800	9,735,000	6,316,900	10,440,000	8,699,700
18	Ret. Pelayanan Pemukiman Umum	4,400,000	3,645,000	4,500,000	1,030,000	4,500,000	880,000	4,500,000	700,000	4,500,000	1,640,000
19	Ret. S I U P	61,100,000	61,860,000	77,100,000	80,320,000	60,000,000	68,080,000	72,010,000	64,820,000	72,010,000	73,170,000
20	Ret. Pemakaian Lahan	50,000,000	57,856,858	30,000,000	24,406,250	30,000,000	29,800,000	30,000,000	67,706,200	30,000,000	51,223,700
21	Ret. IJUK	10,000,000	10,000,000	10,000,000	13,355,050	-	12,512,500	10,000,000	12,512,500	12,500,000	12,712,500
22	Ret. Pengadaan Barang dan Jasa	60,000,000	64,752,614	65,000,000	66,718,650	100,000,000	243,802,742	-	1,821,094,412	-	28,000,000
23	Ret. Ijin Dibidang Kesehatan	65,150,000	43,395,000	70,000,000	70,115,000	100,000,000	1,400,000	100,000,000	52,365,000	122,000,000	26,130,000
24	Ret. Ijin Perveleng. Bid. Kesehatan	9,250,000	9,585,000	11,000,000	11,050,000	11,010,000	11,045,000	11,500,000	13,456,000	12,000,000	8,035,000
25	Ret. Tempat Khusus Parkir	21,800,000	30,545,400	25,000,000	30,545,410	16,800,000	31,636,320	25,000,000	26,818,141	25,000,000	27,255,004
	JUMLAH	9,069,038,000	8,506,221,694	10,940,682,000	10,771,625,836	10,760,800,000	10,429,466,034	10,153,912,000	9,995,101,398	12,192,655,000	10,624,879,516
III	POS 1.2.3. BAGIAN LABA BUMD										
1	Bank Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Perusda Air Minum	185,000,000	185,000,000	225,000,000	225,000,000	400,000,000	400,000,000	520,000,000	260,000,000	650,000,000	332,508,400
3	Aneka Usaha	-	-	-	-	90,000,000	-	125,000,000	-	775,000,000	-
a.	Perusda Percetakan	60,000,000	60,000,000	75,000,000	45,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	47,500,000	-	-
b.	Perusda Apotik	56,000,000	56,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	14,000,000	-	23,386,000	-	-
c.	Bengkel Aneka Usaha	-	-	55,000,000	-	-	-	-	-	-	-
4	Perusda Bank Pasar	900,000,000	800,000,000	1,000,000,000	88,561,405	591,000,000	591,312,690	900,000,000	411,024,150	1,200,000,000	749,066,850
5	Sumbangan BKK	90,000,000	94,358,000	130,206,000	130,206,813	189,494,000	189,494,000	137,269,000	189,494,000	500,000,000	269,629,833
6	Pembagian Dividen BPD	-	-	1,595,000,000	3,038,000,000	1,206,465,000	1,206,465,032	1,308,608,000	1,308,608,944	2,500,000,000	1,813,866,515
	JUMLAH	1,291,000,000	1,195,358,000	3,150,206,000	3,596,768,218	2,476,959,000	2,451,270,952	2,990,877,000	2,187,788,810	5,625,000,000	3,165,071,598
IV	POS 1.2.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN										
1	Penjualan Barang Milik Daerah	14,000,000	21,757,000	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Penghapusan Kendaraan Dinas	-	-	630,000,000	-	291,400,000	-	300,500,000	641,875,000	300,500,000	5,863,725,603
b.	Jasa Giro	1,600,000,000	1,501,204,628	1,500,000,000	2,273,597,676	5,000,000,000	7,212,893,547	8,200,000,000	7,809,834,324	9,000,000,000	245,683,626
c.	Penjualan Barang Bongkaran	65,000,000	76,409,180	70,000,000	70,270,832	100,000,000	125,515,728	116,000,000	254,675,121	120,000,000	10,552,500
d.	Penjualan Barang Inventaris Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e.	Pencermasan Lain-lain	3,802,862,000	5,480,042,041	6,436,000,000	7,089,713,743	5,620,343,000	6,201,349,959	6,723,400,000	16,538,270,533	8,638,300,000	15,310,069,234
f.	Penjualan Pohon	3,500,000	5,613,000	5,000,000	5,000,000	3,500,000	3,500,000	5,000,000	5,000,000	8,000,000	1,050,000
g.	Hasil Penjualan Drum Kosong	-	-	10,000,000	10,000,000	15,000,000	15,000,000	22,500,000	22,500,000	24,990,000	16,000,000
	JUMLAH	5,487,362,000	7,085,027,849	8,651,500,000	9,449,222,251	11,032,243,000	13,560,359,234	15,370,400,000	25,289,654,998	18,091,790,000	21,447,081,063

- 2 -

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V POS 1.3.1. BAGI HASIL PAJAK											
1 Pajak Bumi dan Bangunan	10.900.000.000	16.257.114.848	13.000.000.000	18.765.780.436	11.605.878.000	20.712.687.846	15.500.000.000	24.831.266.523	23.462.040.000	28.735.067.810	
2 Biaya Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	3.385.734.000	4.619.110.252	3.284.307.000	4.875.075.603	3.011.031.000	4.373.957.374	4.956.635.000	4.840.662.667	6.286.230.000	6.798.381.898	
3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 & OPDN	2.462.909.092	3.532.048.396	3.348.281.000	3.752.135.822	3.598.948.000	2.942.820.517	5.022.230.000	2.171.184.900	4.137.810.000	7.290.890.663	
5 Restitusi PPh Pasal 21	-	-	-	-	-	9.000.000.000	-	-	-	-	
JUMLAH	16.748.643.092	24.408.273.496	19.632.588.000	27.393.891.861	27.215.857.000	28.029.465.737	25.477.765.000	31.843.114.090	33.886.180.000	42.824.340.371	
VI POS 1.3.2. BAGI HASIL BUKAN PAJAK											
1 Iuran Hasil Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 Pemberian Hak Atas Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 Sumberdaya Minyak Bumi dan Gas Alam	14.500.000	13.497.918	14.500.000	17.421.144	40.753.000	50.398.027	44.828.000	101.411.511	-	33.827.340	
4 Sumberdaya Alam Kehutanan	241.311.000	458.362.584	241.311.000	110.480.203	110.480.000	77.459.364	121.528.000	219.088.510	538.330.000	383.977.127	
5 Sumberdaya Alam Perikanan	659.435.000	264.195.390	659.435.000	318.317.098	318.317.000	300.879.840	330.148.000	283.079.315	330.110.000	163.213.161	
6 Sumberdaya Alam Pertambangan Umum	7.905.000	1.828.072	7.905.000	32.062.843	8.730.000	32.665	9.603.000	-	7.390.000	33.022.448	
7 Cukai Tembakau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371.908.966	
JUMLAH	923.151.000	737.883.964	923.151.000	478.281.288	478.280.000	428.769.896	526.107.000	603.579.336	895.850.000	985.949.047	
VII POS 1.3.3. DANA ALOKASI UMUM											
1 Dana Alokasi Umum	382.345.000.000	382.345.000.000	404.869.000.000	404.869.000.000	635.488.000.000	635.488.000.000	694.207.000.000	694.207.000.000	744.676.780.000	744.676.786.000	
2 Dana Penyeimbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH	382.345.000.000	382.345.000.000	404.869.000.000	404.869.000.000	635.488.000.000	635.488.000.000	694.207.000.000	694.207.000.000	744.676.780.000	744.676.786.000	
VIII POS 1.3.4. DANA ALOKASI KHUSUS											
1 DAK Non Dana Reboisasi	10.030.000.000	10.030.000.000	11.900.000.000	11.900.000.000	27.530.000.000	27.517.927.000	50.867.000.000	50.867.000.000	62.798.000.000	62.798.000.000	
JUMLAH	10.030.000.000	10.030.000.000	11.900.000.000	11.900.000.000	27.530.000.000	27.517.927.000	50.867.000.000	50.867.000.000	62.798.000.000	62.798.000.000	
IX POS 1.3.5. POS DANA DARURAT											
1 Alokasi ABT-Bencana Alam	-	-	-	-	-	-	-	6.127.388.000	6.127.388.000	-	
JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	6.127.388.000	6.127.388.000	-	
X POS 1.5.1. PENERIMAAN DARI PROPINSI											
1 Bantuan Pembangunan dari Propinsi	1.335.971.000	1.335.971.000	1.878.018.000	225.000.000	2.397.495.000	2.397.495.000	-	-	-	-	
2 Bantuan PAD dari Propinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 a. Bagian Penerimaan PKB BENKB	10.006.206.000	12.974.474.500	12.874.690.000	16.935.595.472	16.771.687.000	16.615.817.590	19.260.254.000	18.825.646.204	21.907.191.000	24.967.612.402	
3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.525.021.000	5.948.356.470	3.817.316.000	5.723.604.643	10.372.602.000	14.538.653.751	14.448.642.000	13.973.339.073	13.548.700.000	16.477.461.586	
4 Bantuan Lain-lain dari Propinsi	-	-	-	1.525.000.000	-	-	-	140.000.000	-	-	
5 Bantuan FEDEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 Bant. Pemb. Jembatan Deleman W.Sari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7 Bant. J. Gantung Pandanan Wonosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 Ijin Kelebihan Mustan	106.855.000	126.037.658	110.815.000	112.978.993	137.600.000	151.369.508	78.517.000	135.380.839	151.360.000	163.785.416	
9 Kekurangan Tahun Yang Lalu	2.541.000.000	2.541.003.750	-	-	-	-	-	-	-	-	
11 Pen. Bagi Hasil Pajak ABT/AP	332.727.000	363.223.650	-	-	321.866.000	326.859.733	-	-	-	-	
12 Bagi Hasil ABT	-	-	320.390.000	311.517.381	-	-	329.232.000	339.696.253	439.233.000	338.689.775	
12 Bagi Hasil P3 AP	39.826.000	40.690.000	13.244.000	15.830.601	-	-	17.784.000	20.539.890	23.230.000	23.570.803	
13 Bantuan Keuangan Dari Propinsi (Tembakau)	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	557.863.000	-	
14 Pen. Tera dan Tera Ulang	9.631.850	10.954.799	12.383.000	12.655.769	15.197.000	11.800.788	19.203.000	14.303.497	16.716.000	15.460.863	
15 Sumb. Pihak ke 3 (Perhutani)	31.805.000	37.762.500	32.799.000	46.279.091	38.449.000	25.639.264	54.225.000	41.043.506	42.293.000	35.488.641	
15 Bantuan Keuangan Dari Prop. (Eks. 2 POA)	-	-	-	-	-	-	12.632.127.000	12.396.757.000	16.245.711.000	16.545.711.125	
JUMLAH	20.929.042.850	24.378.474.327	19.059.655.000	24.908.461.950	30.054.896.000	34.067.635.634	46.840.084.000	45.886.706.262	52.932.297.000	58.567.781.011	
XI PEN. DARI PEMERINTAH PUSAT											
1 Bant. Dana Belanja Peg. & Non Belanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 Pegawai BKKB	4.366.108.000	4.490.847.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 Daba Tunjangan Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 Dana Infrastruktur Sar. & Sarana Bid. Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.435.594.000	
5 Peny. Gaji Ke 13 (Dana Penyeimbang)	28.458.000.000	28.458.000.000	25.605.000.000	25.605.000.000	5.300.000.000	5.375.770.000	-	-	-	3.254.132.400	
6 Bantuan PILKADA dari APBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.206.165	
JUMLAH	32.824.108.000	32.948.847.000	30.905.000.000	30.980.770.000	-	-	-	-	-	16.771.122.565	

- 3 -

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XII POS 1.6.1. URUSAN KAS DAN PERHIT. Pen. Iuran Wajib Pegawai / TASPEN Pen. Pajak Penghasilan (PPH) Ps. 21 Penerimaan BAPERTARUM											
JUMLAH	2004	-	2005	-	2006	-	2007	-	2008	-	
REKAPITULASI											
I Pos Pajak Daerah	10,015,000,000	10,291,535,387	11,115,000,000	9,732,205,843	1,490,000,000	13,052,631,723	13,340,000,000	14,638,314,886	16,230,000,000	18,027,307,132	
II Pos Retribusi Daerah	9,069,038,000	8,506,221,694	10,940,682,000	10,771,625,836	10,760,800,000	10,429,466,034	10,153,912,000	9,995,101,398	12,192,655,000	10,624,879,516	
III Pos Bagian Laba BUMD	1,291,000,000	1,195,358,000	3,150,206,000	3,596,768,218	2,476,959,000	2,451,270,952	2,990,877,000	2,187,788,810	5,625,000,000	3,165,071,598	
VI Pos Lain-lain PAD yang Syah	5,487,362,000	7,085,027,849	8,651,500,000	9,449,222,251	11,032,243,000	13,560,359,234	15,370,400,000	25,289,654,998	18,091,790,000	21,447,081,063	
JUMLAH A (BAGIAN PAD)	25,862,400,000	27,078,142,930	33,857,388,000	33,549,822,148	35,760,002,000	39,493,727,943	41,855,189,000	52,110,860,092	52,139,445,000	53,264,339,309	
V Pos Bagi Hasil Pajak	16,748,643,092	24,408,273,496	19,632,588,000	27,393,891,861	27,215,857,000	28,029,465,737	25,477,765,000	31,843,114,090	33,886,180,000	42,824,340,371	
VI Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	923,151,000	737,883,964	923,151,000	478,281,288	478,280,000	428,769,896	526,107,000	603,579,336	895,850,000	985,949,042	
JUM. B (BAG. DANA PERIMBANGAN)	17,671,794,092	25,146,157,460	20,555,739,000	27,872,173,149	27,694,137,000	28,458,235,633	26,003,872,000	32,446,693,426	34,782,030,000	43,810,289,413	
VII Dana Alokasi Umum	382,345,000,000	382,345,000,000	404,869,000,000	404,869,000,000	635,488,000,000	635,488,000,000	694,207,000,000	694,207,000,000	744,676,780,000	744,676,786,000	
JUM. C (BAG. D A U)	382,345,000,000	382,345,000,000	404,869,000,000	404,869,000,000	635,488,000,000	635,488,000,000	694,207,000,000	694,207,000,000	744,676,780,000	744,676,786,000	
VIII Alokasi ABT-Bencana Alam	-	-	-	-	-	-	6,127,388,000	6,127,388,000	-	-	
JUMLAH D (POS DANA DARURAT)	-	-	-	-	-	-	6,127,388,000	6,127,388,000	-	-	
IX Pos Dana Alokasi Khusus	10,030,000,000	10,030,000,000	11,900,000,000	11,900,000,000	27,530,000,000	27,517,927,000	50,867,000,000	50,867,000,000	62,798,000,000	62,798,000,000	
JUM. D (BAG. DANA ALOKASI KHUSUS)	10,030,000,000	10,030,000,000	11,900,000,000	11,900,000,000	27,530,000,000	27,517,927,000	50,867,000,000	50,867,000,000	62,798,000,000	62,798,000,000	
X Pos Penerimaan Dari Propinsi	20,929,042,850	24,378,474,327	19,059,655,000	24,908,461,950	30,054,896,000	34,067,335,634	46,840,084,000	45,886,706,262	52,932,297,000	58,567,781,011	
JUMLAH E (BANTUAN DARI PROPINSI)	20,929,042,850	24,378,474,327	19,059,655,000	24,908,461,950	30,054,896,000	34,067,335,634	46,840,084,000	45,886,706,262	52,932,297,000	58,567,781,011	
XI Pos Penerimaan Dari Pem. Pusat	32,824,108,000	32,948,847,000	30,905,000,000	30,980,770,000	-	-	-	-	-	16,771,122,565	
JUMLAH F (PEN. DARI. PEM PUSAT)	32,824,108,000	32,948,847,000	30,905,000,000	30,980,770,000	-	-	-	-	-	16,771,122,565	
XII Pos Urusan Kas dan Perhitungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUM. G (BAG. URUSAN KAS & PERHIT.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH SEMUA (A+B+C+D+E+F)	489,662,344,942	501,926,621,717	521,146,782,000	534,080,227,247	756,527,035,000	765,025,526,210	865,900,533,000	881,645,647,780	947,328,552,000	979,888,318,298	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengangkatan Anak	225.000	330.000	-5.000	375.000	(150.000)	107
	Pengesahan Anak	30.000	15.000	-	15.000	15.000	50
	Perubahan Nama	30.000	135.000	-	135.000	(105.000)	450
	Perubahan Status Kewarganegaraan	75.000	-	-	-	75.000	0
	Perubahan Peristiwa Penting Lainnya	100.000	525.000	-	525.000	(425.000)	525
	Surat Keterangan Kependudukan	5.000.000	31.270.000	4.055.000	35.325.000	(30.325.000)	207
	Legalisasi Akta Dalam Daerah	17.500.000	10.877.500	990.000	11.867.500	5.632.500	68
	Legalisasi akta Luar Daerah	-	23.000	17.000	40.000	(40.000)	-
	Kutipan Kedua Akta Kelahiran:	2.300.000	3.875.000	310.000	4.185.000	(2.885.000)	182
	- Anak Ke 1 s/d 2	1.300.000	2.540.000	220.000	2.760.000	(1.460.000)	212
	- Anak Ke 3 s/d seterusnya	1.000.000	1.335.000	90.000	1.425.000	(425.000)	143
	Kutipan Kedua Akta Perkawinan	325.000	150.000	25.000	175.000	150.000	54
	Kutipan Kedua Akta Perceraian	75.000	75.000	-	75.000	-	100
	Kutipan Kedua Akta Kematian	15.000	-	-	-	15.000	0
	Kutipan Kedua Akta Pengangkatan Anak	70.000	-	-	-	70.000	0
1 03 01 4 1 2 01 04	RETRIB.PELAYAN PEMAKAMAN & PENGABUAN MAYAT:	4.500.000	1.640.000	-	1.640.000	2.860.000	35
	Pendaftaran Makam Baru	1.400.000	1.640.000	-	1.640.000	(240.000)	117
	Pendaftaran Ulang	2.400.000	-	-	-	2.400.000	0
	Pesan Tanah Makam	700.000	-	-	-	700.000	0
1 20 20 4 1 2 01 05	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM:	600.000.000	509.323.799	94.802.030	604.125.700	(4.125.700)	101
1 20 21 4 1 2 01 06	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR :	2.872.000.000	2.245.324.545	223.942.340	2.469.266.885	402.733.115	86
	Retribusi Dasar	2.436.000.000	2.006.511.225	207.056.135	2.215.567.360	220.432.640	91
	Titipan Sepeda	388.000.000	193.599.120	14.094.305	207.694.025	180.305.575	54
	Pemberhentian Kendaraan	13.000.000	9.705.600	716.000	10.421.600	2.578.400	82
	Pengelolaan MCK	35.000.000	33.508.600	2.075.300	35.583.900	(583.900)	102
	Lain-lain pasar	-	-	-	-	-	-
1 07 01 4 1 2 01 07	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR :	578.427.000	527.035.500	50.216.000	577.251.500	1.175.500	100
	Kendaraan JBB s/d 7.200 Kg	382.815.000	328.929.000	31.349.000	360.278.000	22.537.000	94
	Kendaraan JBB 7.201 s/d 15.000 Kg	55.016.000	54.990.500	6.094.000	61.074.500	(6.058.500)	111
	Kendaraan JBB Diatas 15.000 Kg	5.187.000	3.505.500	242.000	3.847.500	1.339.500	74
	Kereta Gandeng	210.000	168.000	21.000	189.000	21.000	90
	Pendapatan yang Diperkirakan	35.000.000	54.019.000	3.201.000	59.220.000	(24.220.000)	169
	Biaya Penggantian Tanda Uji	46.495.000	40.610.000	3.952.500	44.562.500	1.932.500	95
	Biaya Penggantian Buku Uji	47.500.000	34.870.000	2.095.000	36.965.000	10.535.000	73
	Biaya/Mutasi Keluar	6.204.000	9.943.500	1.171.500	11.115.000	(4.911.000)	179
1 03 01 4 1 2 01 08	RETRIB.PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN:	5.700.000	1.590.000	4.110.000	5.700.000	-	100
	Perusahaan	4.200.000	840.000	2.496.000	3.336.000	664.000	79

D:\DATA\N\NG09\REK PAD 09 DES

JANUARI 2010

HAL 3

1	2	3	4	5	6	7	8
	Toko	1.300.000	750.000	1.614.000	2.264.000	(864.000)	158
1 20 0304 4 1 2 01 11	RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA IUK :	13.000.000	1.000.000	12.750.000	13.750.000	(750.000)	105
1 20 0302 4 1 2 01 12	Retribusi Penggantian Biaya Dokumen Pengadaan Brq & Jasa	-	-	-	-	-	-
1	RETRIBUSI JASA USAHA :	2.051.081.000	1.369.225.335	235.576.775	1.604.802.210	446.278.790	75
1 20 20 4 1 2 02 01	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH :	241.352.000	183.706.500	13.094.500	196.801.000	44.551.000	82
	Sewa Tanah Komple s Rita	1.100.000	917.000	57.500	974.500	125.500	88
	Sewa Pmasngn Papan Reklame	150.000.000	101.573.000	-	101.573.000	48.427.000	69
	Sewa Gedung dan Lap GOR	90.000.000	80.390.000	10.310.000	90.690.000	(690.000)	103
	Sewa Tanah Terminal Cawas	252.000	231.000	21.000	252.000	-	100
	Sewa Rumah Dinas	-	605.500	2.706.000	3.311.500	(3.311.500)	-
	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH :	9.500.000	500.000	1.500.000	2.000.000	7.500.000	21
	Sewa Aula SKB Cawas	9.500.000	500.000	1.500.000	2.000.000	7.500.000	21
1 02 01 4 1 2 02 01	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH :	32.300.000	13.569.000	2.281.000	15.850.000	16.450.000	49
	Sewa Titipan Sepeda PPKS Delanggu	2.300.000	1.150.000	1.150.000	2.300.000	-	100
	Persewaan Ambulance	30.000.000	12.419.000	1.131.000	13.550.000	16.450.000	49
1 03 01 4 1 2 02 01	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH :	142.670.000	142.031.400	10.330.000	152.361.400	(9.691.400)	107
	Penggunaan Stadion Trikoyo	15.000.000	6.840.000	705.000	7.545.000	7.455.000	53
	Penggunaan Alan-alan	10.000.000	6.625.000	1.700.000	10.325.000	(325.000)	103
	Persewaan Alat Berat	49.980.000	42.100.000	7.925.000	50.025.000	(45.000)	100
	Tanah-tanah Pengairan	30.000.000	46.776.400	-	46.776.400	(16.776.400)	156
	Penggunaan Jalan Kabupaten	37.690.000	37.690.000	-	37.690.000	-	100
1 20 0304 4 1 2 02 01	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH :	13.750.000	21.724.000	50.000	21.774.000	(8.024.000)	158
	Sewa Bangunan Kantor eks Tub Jatnom	2.500.000	4.250.000	-	4.250.000	(1.750.000)	170
	Sewa Bangunan Kantor eks Tub Pedan	1.500.000	3.300.000	-	3.300.000	(1.800.000)	220
	Sewa Bangunan Kantor eks Tub Gondng	450.000	500.000	50.000	550.000	(100.000)	122
	Sewa Ruangn Setda Blok C	-	-	-	-	-	-
	Kantor eks Disnaker Gayampit	750.000	-	-	-	-	-
	Sewa Bangunan eks SD Puluhan Trucuk	350.000	350.000	-	-	750.000	0
	Sewa Rumah Dinas Giri Mulwo	400.000	-	-	350.000	-	109
	Sewa Dinas eks MPP Ke Juwiring	800.000	-	-	-	400.000	0
	Sewa Dinas eks MPP Kec. Kemalang	600.000	-	-	-	800.000	0
	Sewa Dinas Giri Tegalyoso	600.000	600.000	-	600.000	-	100
	Sewa Rumah Dinas Giri Prambanan	1.500.000	1.200.000	-	1.200.000	(400.000)	150
	Sewa Sawah Manjungan Ngawen	1.500.000	1.500.000	-	-	1.500.000	0

D:\DATA\NING09\REK PAD 09 DES

JANUARI 2010

HAL 4

							2	3	4	5	6	7	8	
							Sewa Tanah Sawah Gedung Dharma Wanita	1.500.000	1.200.000	-	-	1.200.000	500.000	61
							Sewa Tanah Sawah Jilify Kuswanto	100.000	-	-	-	-	100.000	61
							Sewa Sawah Belakang Pemda (Tegaloso)	1.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	(2.000.000)	303
							Sewa Sawah Kel. Gergunung	-	-	-	-	-	-	-
							Sewa ruangan di Kompleks RSPD	-	-	-	-	-	-	-
							Sewa tanah Komplek kecamatan Bayat	-	1.800.000	-	-	1.800.000	(1.800.000)	-
							Sewa tanah untuk Kantor UF-K-PPK Ronggo (Varsito 2008-2009)	-	1.024.000	-	-	1.024.000	(1.024.000)	-
							Sewa gedung SD Gayampri	-	1.500.000	-	-	1.500.000	(1.500.000)	-
							Sewa tanah Semrat Prambanan	-	1.500.000	-	-	1.500.000	(1.500.000)	-
1	25	01	4	1	2	02	01	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH :	40.000.000	23.864.000		23.864.000	16.136.000	60
							Penerimaan RSPD	40.000.000	23.864.000			23.864.000	16.136.000	60
2	01	01	4	1	2	02	01	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH :	58.000.000	50.791.000	4.779.000	55.570.000	2.430.000	98
							Pemeriksaan Kesehatan Hewan Keliling	20.000.000	16.141.000	1.753.000		17.894.000	2.106.000	89
							Pemeriksaan IB	38.000.000	34.650.000	3.026.000		37.676.000	324.000	97
1	20	20	4	1	2	02	02	RETRIBUSI PASAR GROSIR/PERTOKOAN :	66.000.000	49.953.815	19.076.315	69.030.130	(3.030.130)	105
							Kios Dijuar Pasar	45.000.000	41.526.065	4.625.315		49.151.380	(4.151.380)	104
							Kios Terminal	21.000.000	5.427.750	14.451.000		19.878.750	1.121.250	95
1	20	21	4	1	2	02	02	RETRIBUSI PASAR GROSIR/PERTOKOAN :	400.000.000	325.287.870	37.119.860	362.407.730	37.592.270	91
							Hasil Sewa Kios/Toko di Pasar	390.000.000	309.774.620	32.836.860		342.611.480	37.288.520	90
							Biaya Balik Nama	20.000.000	15.513.250	4.283.000		19.796.250	203.750	93
1	20	20	4	1	2	02	04	RETRIBUSI TERMINAL :	205.000.000	131.986.600	12.088.600	143.575.200	51.424.800	70
							Terminal Jorogarang	102.510.000	64.871.600	6.010.100		70.881.700	32.028.300	69
							Sub Terminal Bendogantungan	2.665.000	2.144.200	208.600		2.352.800	512.200	89
							Sub Terminal Pengagung	33.005.000	25.639.300	2.357.500		28.046.800	4.958.200	89
							Sub Terminal Tulung	4.920.000	4.371.800	45.500		4.817.300	102.700	93
							Sub Terminal Angkutan Kota	21.730.000	10.863.000	1.020.000		11.883.000	9.847.000	55
							Sub Terminal Cawas	22.755.000	14.332.700	1.263.000		15.595.700	7.159.300	69
							Sub Terminal Teloyo	9.430.000	4.812.200	405.400		5.217.600	4.212.400	55
							Sub Terminal Menisrengego	3.075.000	876.800	54.500		931.300	2.143.700	39
							Sub Terminal Delanagu	4.510.000	3.525.000	324.000		3.849.000	661.000	85
1	20	20	4	1	2	02	05	RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR :	16.000.000	13.200.000	2.800.000	16.060.000	-	100
1	03	01	4	1	2	02	07	RETRIB. PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS:	25.030.000	19.965.000	3.136.000	22.995.000	2.035.000	92
							Luar Daerah	7.905.000	6.515.000	680.000		7.195.000	710.000	91
							Dalam Daerah	14.625.000	13.350.000	1.950.000		15.300.000	(675.000)	105
							Budidaya IPLT	2.500.000	-	500.000		500.000	2.000.000	20

				2	3	4	5	6	7	8
				Car. Lain-lain	5.000.000	27.769.500	-	27.789.500	(22.769.500)	555
				Hotel	18.000.000	5.187.250	-	5.187.250	12.812.750	22
				Pengalangan Pantai	90.000.000	1.722.000	-	1.722.000	88.278.000	21
				RE/BP	4.500.000	2.038.500	120.000	2.158.500	2.341.500	41
				Wartel	500.000	-	-	-	500.000	2
				SFBU	40.000.000	27.918.000	-	27.918.000	12.082.000	73
				Rumah Makan/restoran	9.000.000	8.059.000	-	8.069.000	9.100	93
				Pengalangan Batu Kapur	7.500.000	-	-	-	7.500.000	2
				Konveksi	6.000.000	-	-	-	6.000.000	2
				Rental (Komputer/VCD / PS)	1.000.000	-	-	-	1.000.000	3
				Pengoperasian Kayu	4.000.000	4.546.000	-	4.546.000	(546.000)	115
				Panti Pijat	2.000.000	-	-	-	2.000.000	3
				Percetakan / Penerbitan	48.000.000	13.780.000	-	13.780.000	34.220.000	25
				Peternakan	10.000.000	-	-	-	10.000.000	3
				Salon	1.500.000	1.092.000	-	1.092.000	408.000	73
				Gudang	4.500.000	2.043.000	-	2.043.000	2.457.000	45
				Pengolahan daging	2.600.000	-	-	-	2.600.000	3
				Furniture	12.000.000	1.400.000	-	1.400.000	10.600.000	12
				Apotek	4.000.000	2.304.000	130.000	2.434.000	1.566.000	62
				Percetakan / Penerbitan	10.000.000	640.000	-	640.000	9.360.000	3
				Agan minyak	7.500.000	-	-	-	7.500.000	3
				Garase	2.000.000	13.915.500	-	13.915.500	(11.915.500)	595
				lain-lain	10.000.000	44.059.000	34.040.000	78.099.000	(68.099.000)	761
1				RETRIBUSI DIN TRAYEK :	7.050.000	5.570.200	666.000	6.236.200	813.800	65
	07	01	4 1 2 03 04	Ijin Trayek Bus Sedang	1.150.000	690.000	-	690.000	460.000	63
				Ijin Trayek Microbus	4.700.000	3.200.000	400.000	3.600.000	1.100.000	77
				Ijin Insidenbl Kendaraan	1.200.000	1.260.000	130.000	1.440.000	(240.000)	123
				Denda Ijin Trayek	-	420.200	86.000	506.200	(506.200)	
1	02	01	4 1 2 03 06	RETRIBUSI IJIN DI BIDANG KESEHATAN :	125.000.000	58.780.000	4.875.000	63.655.000	61.345.000	51
2	04	01	4 1 2 03 08	RETRIBUSI IJIN DI BIDANG KEPARIWISATAAN:	4.910.000	10.035.000	175.000	10.210.000	(5.300.000)	205
				Hotel	4.310.000	5.160.000	100.000	5.260.000	(950.000)	122
				Rumah Makan	-	850.000	-	850.000	(850.000)	
				UR/HU	600.000	4.025.000	75.000	4.100.000	(3.500.000)	683
1	15	01	4 1 2 03 09	RETRIBUSI SIUP :	80.000.000	68.940.000	7.230.000	76.170.000	3.830.000	95
				SIUP PK	31.250.000	32.050.000	2.410.000	34.460.000	(3.210.000)	119
				SIUP PM	9.000.000	4.800.000	800.000	5.600.000	3.400.000	62
				SIUP Pts	10.000.000	6.050.000	1.500.000	7.550.000	2.450.000	76
				TGI	4.000.000	2.750.000	250.000	3.000.000	1.000.000	75

		2	3	4	5	6	7	8
2	01	01	4	1	2	03	09	
		RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAL :		104.310.000	72.747.250	7.271.500	80.018.750	24.291.250
				51.435.000	29.941.250	3.001.500	32.942.750	18.492.250
				31.560.000	24.522.500	2.220.000	26.742.500	4.817.500
				7.080.000	4.215.250	520.000	4.715.250	2.364.750
				5.835.000	2.933.750	1.200.000	4.133.750	1.701.250
				8.400.000	11.134.500	350.000	11.484.500	(3.084.500)
2	04	01	4	1	2	03	0	
		RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA:		588.000.000	292.199.000	91.156.000	383.355.000	204.645.000
				60.000.000	34.000.000	-	34.000.000	26.000.000
				27.000.000	27.030.000	-	27.030.000	(30.000)
				90.000.000	60.000.000	-	60.000.000	30.000.000
				22.000.000	22.000.000	-	22.000.000	-
				17.000.000	10.000.000	1.500.000	11.500.000	5.500.000
				165.200.000	57.600.000	57.600.000	115.200.000	50.000.000
				80.000.000	43.650.000	11.400.000	55.050.000	24.950.000
				65.000.000	32.225.000	16.000.000	48.225.000	36.775.000
				1.500.000	1.250.000	-	1.250.000	250.000
				700.000	-	-	-	700.000
				25.000.000	1.000.000	500.000	4.500.000	20.500.000
				600.000	444.000	156.000	600.000	-
				2.500.000	-	-	-	2.500.000
				1.000.000	-	-	-	1.000.000
				10.500.000	-	1.000.000	1.000.000	6.500.000
2	01	01	4	1	2	03	33	
		RETRIBUSI PEHJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH:		109.169.000	78.300.000	30.900.000	59.200.000	49.569.000
				62.169.000	21.620.000	-	21.600.000	40.569.000
				47.000.000	6.700.000	30.900.000	37.600.000	9.400.000
1			4	1	2	03		
		RETRIBUSI PERDIANAN TERTENTU :		1.296.960.000	946.438.545	95.223.477	1.041.662.122	255.297.878
1	03	01	4	1	2	03	01	
		RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN :		700.000.000	426.327.950	41.683.277	468.014.227	231.985.773
				274.655.700	149.245.053	22.567.811	171.812.864	102.842.836
				157.080.000	142.974.552	8.652.378	151.626.930	5.433.070
				212.650.000	-	-	-	212.650.000
				55.414.300	134.108.345	10.466.088	144.574.433	(89.160.133)
				-	-	-	-	-
1	20	030	4	1	2	03	03	
		RETRIBUSI IJIN GANGGUAN/KERAMAIAAN :		350.000.000	376.785.495	40.591.200	417.376.695	(67.376.695)
				24.000.000	32.344.025	3.723.200	36.067.225	(12.067.225)
				7.600.000	1.672.000	130.000	1.852.000	5.148.000
				5.000.000	-	-	-	5.000.000
				15.000.000	186.065.720	2.348.000	188.413.720	(173.413.720)

D:\DATA\NINGOS\REK PAD 09 DES

JANUARI 2010

HAL 6

1	2	3	4	5	6	7	8
	TDG	1.000.000	950.000	290.000	1.240.000	(240.000)	124
	TDP PT	4.500.000	4.500.000	800.000	5.300.000	(800.000)	115
	TDP Kooperasi	250.000	200.000	-	200.000	50.000	80
	TDP CV	3.240.000	5.920.000	490.000	6.400.000	(3.160.000)	198
	TDP PERORANGAN	14.560.000	10.120.000	700.000	10.820.000	3.740.000	74
	TDP Perusahaan Lainnya	600.000	1.200.000	-	1.200.000	(600.000)	200
	IUI	1.600.000	400.000	-	400.000	1.200.000	25
1							
20 0304 4 1 2 03 10	Retribusi Pengaturan Perubahan Femanfaatan Lahan :	30.000.000	-	-	-	30.000.000	0
1							
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH :	5.481.000.000	4.101.082.943		4.101.082.943	1.379.917.057	75
1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada PERUSDA	5.481.000.000	4.101.082.943		4.101.082.943	1.379.917.057	75
1 20 0304 4 1 3 101 01	PDAM	800.000.000	650.540.000	-	650.540.000	149.460.000	81
1 20 0304 4 1 3 101 02	Perusda Aneka Usaha	200.000.000	-	-	-	200.000.000	0
1 20 0304 4 1 3 101 03	Perusda Bank Pasar	1.100.000.000	1.069.136.550	-	1.069.136.550	30.863.450	97
1 20 0304 4 1 3 101 04	BKK	381.000.000	406.430.494	-	406.430.494	(25.430.494)	107
1 20 05 4 1 3 01 05	Pembagian Dividen Bank Jateng	3.000.000.000	1.974.975.899	-	1.974.975.899	1.025.024.101	66
1							
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH :	27.727.058.000	17.672.029.735	1.485.115.450	19.157.145.185	8.569.912.815	69
1	Hasil Penjualan Asset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	182.990.000	134.890.814	88.513.000	223.403.814	(40.413.814)	122
1 20 0307 4 1 4 01 06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	-	-	-	-	-	-
1 03 01 4 1 4 01 07	Penjualan Drum Bekas	24.990.000	-	24.990.000	24.990.000	-	100
1 03 01 4 1 4 01 08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	8.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000	-	100
1 03 01 4 1 4 06 10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	150.000.000	130.890.814	59.523.000	190.413.814	(40.413.814)	127
1							
1 20 05 4 1 4 02	PENERIMA JASA GIRO :	10.500.000.000	2.776.785.770	136.009.760	2.912.795.530	7.587.204.470	28
1 20 05 4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	10.500.000.000	2.776.785.770	136.009.760	2.912.795.530	7.587.204.470	28
1							
1 20 05 4 1 4 03	PEDAPATAN BUNGA DEPOSITO :	576.000.000	868.333.145	79.166.650	947.499.795	(371.499.795)	164
1 20 05 4 1 4 03 01	Rekening Deposito Pada Bank Pasar	576.000.000	868.333.145	79.166.650	947.499.795	(371.499.795)	164
1							
	PENERIMAAN LAIN-LAIN :	16.468.068.000	13.892.020.006	1.181.426.040	15.073.446.046	1.394.621.954	92
1 20 20 4 1 4 14 01	Sumbangan Pihak III (Rekanan) :						
1	PT. Aqua Tirta Investama	6.500.000.000	4.840.767.250	516.108.780	5.356.876.030	1.143.123.970	82
2 02 01 4 1 4 14 01	Sumbangan Pihak III (Politeknik Ceper)	-	10.000.000	-	10.000.000	(10.000.000)	-
1 01 01 4 1 4 14 01	Sumbangan Pihak III (Huller) :						
1	Huller	15.000.000	-	-	-	15.000.000	0
1	Sapi Kereman	9.000.000	9.552.000	-	9.552.000	(552.000)	105
1 20 0304 4 1 4 14 02	Sumbangan PDAM Surakarta	3.000.000.000	1.991.662.994	336.541.300	2.328.204.294	671.795.706	73
1 20 0304 4 1 4 14 03	Sumbangan Puspetasari, BAT, & Perusahaan Lainnya	175.000.000	24.000.000	5.000.000	29.000.000	146.000.000	17

D:\DATA\NING99\REK PAD 09 DES

JANUARI 2016 HAL 3

1	2	3	4	5	6	7	8							
20	05	4	3	01	01	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON DANA REBOISASI:	71.995.000.000	53.996.250.000	17.998.750.000	71.995.000.000	-	100		
						Pendidikan	40.176.000.000	53.996.250.000	17.998.750.000	71.995.000.000	(31.819.000.000)	179		
						Kesehatan	9.257.000.000	-	-	-	9.257.000.000	0		
						Kependudukan	715.000.000	-	-	-	715.000.000	0		
						Infrastruktur Jalan	8.883.000.000	-	-	-	8.883.000.000	0		
						Infrastruktur Irigasi	3.775.000.000	-	-	-	3.775.000.000	0		
						Infrastruktur Air Bersih	2.697.000.000	-	-	-	2.697.000.000	0		
						Kelautan dan Perikanan	1.534.000.000	-	-	-	1.534.000.000	0		
						Pertanian	2.809.000.000	-	-	-	2.809.000.000	0		
						Lingkungan Hidup	736.000.000	-	-	-	736.000.000	0		
1						Indagkop/Perdagangan	1.413.000.000	-	-	-	1.413.000.000	0		
20	05	4	3			LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH:	67.341.478.000	56.653.078.070	15.069.406.811	71.722.484.881	(4.381.006.881)	107		
20	05	4	3	2		DANA DARURAT :	-	-	-	-	-	-		
20	05	4	3	2	01	Penanggulangan Korban / Kesusahan akibat Bencana Alam	-	-	-	-	-	-		
20	05	4	3	2	01	Penanggulangan Korban / Kerusakan akibat Bencana Alam	-	-	-	-	-	-		
1	20	05	4	3	3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	45.589.377.000	40.427.979.858	9.328.577.243	49.756.557.101	(4.167.180.101)	109		
1	20	05	4	3	3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI :	45.589.377.000	40.427.979.858	9.328.577.243	49.756.557.101	(4.167.180.101)	109		
1	20	05	4	3	3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI :	45.589.377.000	40.427.979.858	9.328.577.243	49.756.557.101	(4.167.180.101)	109		
1	20	05	4	3	3	01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	12.465.557.000	11.420.371.794	2.770.843.005	14.191.214.799	(1.725.657.799)	114	
1	20	05	4	3	3	01	03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.266.052.000	9.019.866.182	2.883.078.688	11.902.944.870	(1.694.892.870)	117
1	20	05	4	3	3	01	06	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT	319.448.000	7.329.996.852	59.355.654	7.369.252.506	(7.069.804.506)	2.313
1	20	05	4	3	3	01	07	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan APT	16.914.000	132.460.360	2.275.903	134.736.263	(117.822.263)	797
1	20	05	4	3	3	01	08	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.371.026.000	8.358.690.129	1.719.510.858	10.076.190.987	7.292.835.013	58
1	20	05	4	3	3	01	09	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	5.208.380.000	4.161.704.541	1.893.513.135	6.060.217.676	(851.837.676)	116
20	05	4	3	4		DANA PENYESUAIAN DAN OTOHOMI KHUSUS :	6.950.742.000	2.085.223.000	4.865.519.000	6.950.742.000	-	100		
20	05	4	3	4	01	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-		
20	05	4	3	4	01	01	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pemb Daerah	6.950.742.000	2.085.223.000	4.865.519.000	6.950.742.000	-	100	
1	20	05	4	3	5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	14.801.359.060	14.139.875.212	875.310.568	15.015.185.780	(213.826.780)	101		
1	20	05	4	3	5		(224.009.000)	-	-	-	-	-		
1	20	05	4	3	5	01	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI :	14.801.359.060	14.139.875.212	875.310.568	15.015.185.780	(213.826.780)	101	
1	20	05	4	3	5	01	Bantuan Keuangan dari Provinsi (Eks 2POA)	14.577.350.000	14.139.875.212	814.652.500	15.015.185.780	(437.835.780)	103	
						a. Bapeda	130.000.000	125.000.000	-	125.000.000	5.000.000	96		
						b. KPM	265.000.000	263.000.000	-	263.000.000	2.000.000	99		
						c. Kantor Dukcapil	150.000.000	-	-	-	150.000.000	0		
						d. Dispe dan KP	-	150.000.000	-	150.000.000	(150.000.000)	0		
						e. DPU	1.432.350.000	837.497.500	539.152.500	1.376.650.000	55.700.000	95		
D:\DATA\NING09\REK PAD 09 DES							JANUARI 2010		HAL 10					

		1	2	3	4	5	6	7	8					
1	20	05	4	1	4	14	04	Sumbangan PTPN X (Fertisuban)	25.600.000	5.000.000	-	5.000.000	20.000.000	2
1	20	05	4	1	4	14	05	Surat Dinas	5.100.000	3.450.000	699.500	4.149.500	950.500	6
1	20	05	4	1	4	14	06	Penerimaan Lainnya yang Tidak Dianggarkan	6.758.968.000	7.007.577.762	323.086.460	7.330.664.222	(591.696.222)	109
1				4	2			DANA PERALIHAN :	839.713.539.000	809.920.832.203	56.287.242.990	866.208.075.193	(26.494.536.193)	103
1				4	2	1		BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK:	41.526.277.000	29.732.320.203	8.986.817.990	38.719.138.193	2.807.138.807	99
1				4	2	1		BAGI HASIL PAJAK :	40.540.842.000	29.360.235.823	8.921.525.691	38.281.761.514	2.259.080.486	94
1				4	2	1	01	BAGI HASIL DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN:	27.640.842.000	20.262.841.398	4.532.214.540	24.795.055.938	2.845.786.062	90
								Pedesaan	2.200.000.000	16.160.227.127	3.772.357.909	19.932.585.036	(17.732.585.036)	905
								Perkotaan	2.750.000.000	-	-	-	2.750.000.000	91
								Perkebunan	175.000.000	-	-	-	175.000.000	92
								Perhutanan	25.000.000	-	-	-	25.000.000	93
								Pertambangan	18.591.311.000	-	-	-	18.591.311.000	94
								Bagian dari Pemerintah Pusat	3.899.501.000	3.119.857.377	324.968.293	3.444.825.670	454.675.330	89
								Tambahan Bagi Hasil PBB	-	-	-	-	-	-
								Tunggakan PBB s/d T.A. Lalu	-	-	-	-	-	-
								Insepsi	-	982.756.894	434.888.338	1.417.645.232	(1.417.645.232)	-
1	20	05	4	2	1	01	02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan:	7.500.000.000	4.956.472.168	1.567.132.240	6.523.604.408	976.395.592	87
								BPHTB Daerah	4.500.000.000	3.451.575.904	596.956.865	4.048.542.769	451.457.231	91
								BPHTB dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000	1.504.896.264	970.165.375	2.475.061.639	524.938.361	83
								Tambahan Bagi Hasil BPHTB	-	-	-	-	-	-
1	20	05	4	2	1	01	03	BAGI HASIL DARI PAJAK PENGHASILAN (PPh)& OPDH:	5.400.000.000	4.149.922.257	2.822.178.911	6.963.101.168	(1.563.101.168)	129
								Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	5.000.000.000	3.820.876.242	2.621.249.018	6.442.125.260	(1.442.125.260)	129
								Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 OPDN	400.000.000	320.046.015	200.929.893	520.975.908	(120.975.908)	130
1	20	05	4	2	1	02		BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM :	985.435.000	372.084.380	65.292.299	437.376.679	543.058.321	41
1	20	05	4	2	1	02	02	Bagi Hasil dan Provisi Sumber Daya Hutan	985.435.000	253.969.686	65.292.299	319.261.985	666.173.015	30
1	20	05	4	2	1	02	07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	-	96.517.277	-	96.517.277	(96.517.277)	-
1	20	05	4	2	1	02	06	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	-	17.743.322	-	17.743.322	(17.743.322)	-
1	20	05	4	2	1	02	11	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	-	3.854.095	-	3.854.095	(3.854.095)	-
1	20	05	4	2	1	02	12	Bagi Hasil Penerimaan Cukai Hasil Terbakau	-	-	-	-	-	-
1	20	05	4	2	2			DANA ALOKASI UMUM (DAU) :	726.192.262.000	726.192.262.000	29.301.675.000	755.493.937.000	(29.301.675.000)	104
1	20	05	4	2	2			DANA ALOKASI UMUM (DAU) :	726.192.262.000	726.192.262.000	29.301.675.000	755.493.937.000	(29.301.675.000)	104
1	20	05	4	2	2	01	01	Dana Alokasi Umum	726.192.262.000	726.192.262.000	29.301.675.000	755.493.937.000	(29.301.675.000)	104
1	20	05	4	2	3			DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) :	71.995.000.000	53.996.250.000	17.998.750.000	71.995.000.000	-	101
1	20	05	4	2	3			DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) :	71.995.000.000	53.996.250.000	17.998.750.000	71.995.000.000	-	101
1	20	05	4	2	3	01		DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) :	71.995.000.000	53.996.250.000	17.998.750.000	71.995.000.000	-	101